

BADAN PENGARAH PAPUA
BADAN PENGARAH PAPUA PROVINSI PAPUA

GEDUNG KEUANGAN NEGARA JAYAPURA LANTAI 4 JALAN AHMAD YANI NOMOR 8 GURABESI
KOTA JAYAPURA 99111; TELEPON (0967) 5164423
SUREL BADANPENGARAHAPUA@GMAIL.COM; SITUS WWW.BADANPENGARAHAPUA.GO.ID/

NOTA DINAS
NOMOR ND-14/BPP-P/JYP/2026

Yth. : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua
selaku Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua Jayapura
Dari : Anggota Badan Pengarah Papua Provinsi Papua
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Laporan Bulan Juli
Tanggal : 6 Agustus 2026

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya berbagai kegiatan oleh Anggota Badan Pengarah Papua bersama Kelompok Kerja (Pokja) Papua Polhukam, Papua Produktif, Papua Cerdas, dan Papua Sehat Badan Pengarah Papua Perwakilan Provinsi Papua selama bulan Juli 2026, bersama ini kami sampaikan Laporan Bulanan Badan Pengarah Papua Perwakilan Provinsi Papua Bulan Juli 2026 sebagai bentuk pertanggungjawaban, dokumentasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengarah Papua Provinsi Papua.

Laporan bulanan ini memuat pelaksanaan kegiatan, koordinasi, hasil pembahasan, serta tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Anggota BPP dan masing-masing Pokja selama bulan Juli 2026. Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi, dokumentasi, evaluasi, dan masukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) Badan Pengarah Papua dalam rangka mendukung percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua di Provinsi Papua.

Demikian Nota Dinas ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.

Jayapura, 6 Agustus 2026
Anggota Badan Pengarah Papua
Perwakilan Prov. Papua

Alberth Yoku, S.Ag


Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua selaku Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua Jayapura
2. Badan Pengarah Papua Provinsi Papua (Arsip)

LAPORAN BULANAN

BADAN PENGARAH PAPUA



POKJA PAPUA CERDAS



POKJA PAPUA SEHAT



POKJA PAPUA POLHUKAM



POKJA PAPUA PRODUKTIF

PROVINSI PAPUA

BULAN JULI 2026





RINGKASAN EKSEKUTIF

Selama bulan Juli 2026, Badan Pengarah Papua (BPP) Provinsi Papua melalui Anggota Badan dan Kelompok Kerja (Pokja) telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis dalam rangka pelaksanaan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) guna mendukung percepatan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua. Kegiatan yang dilaksanakan mencakup penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi Orang Asli Papua, penyelesaian permasalahan pertanahan, serta penguatan koordinasi lintas sektor dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat adat.

Pelaksanaan kegiatan selama bulan Juli 2026 berjalan dengan baik dan menghasilkan berbagai rekomendasi strategis yang memerlukan tindak lanjut secara berkelanjutan. BPP terus mengawal pelaksanaan program prioritas melalui peran sebagai fasilitator, koordinator, dan penghubung antar pemangku kepentingan guna mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.



ALBERTH YOKU, S.Ag
Anggota BPP RI Provinsi Papua



JULI 2026



DAFTAR ISI

Cover		1
Ringkasan Eklusif		2
Daftar Isi		4
Kegiatan Anggota BPP		5
Kegiatan Pokja Papua Polhukam		17
Kegiatan Pokja Papua Produktif		24
Kegiatan Pokja Papua Cerdas		34
Kegiatan Pokja Papua Sehat		43
Kesimpulan		49
Penutup		53

ANGGOTA BADAN PENGARAH PAPUA



JULI 2026

Badan Pengarah Papua
Perwakilan Provinsi Papua



Kegiatan Strategis

Selama bulan Juli 2026, Anggota Badan dan Kelompok Kerja (Pokja) Badan Pengarah Papua (BPP)/Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengarah Papua.

Kegiatan Anggota BPP/BP3OKP Provinsi Papua

No	Kegiatan Strategis	Tujuan	Hasil	Rekomendasi	Dokumentasi
1	Rapat Pembahasan Program Kokurikuler Noken bersama Tim Pengembang (Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Papua) dan BP3OKP/BPP. 2 Juli 2026	Membahas perkembangan penyusunan Program Kokurikuler Noken sebagai upaya pelestarian budaya Papua melalui pendidikan serta mengidentifikasi dukungan BPP terhadap keberlanjutan program yang terkendala pendanaan.	1. BPP mengapresiasi pengembangan Program Kokurikuler Noken sebagai upaya pelestarian budaya Papua melalui pendidikan. 2. Tim Pengembang BGTK Provinsi Papua memaparkan perkembangan penyusunan perangkat pembelajaran, meliputi buku ajar, panduan pembelajaran, dan RPP, serta rencana pelatihan guru menggunakan model IN-OCT-IN2. 3. Teridentifikasi kebutuhan dukungan pendanaan untuk finalisasi buku ajar, pelaksanaan workshop, pelatihan guru, dan seminar diseminasi. 4. Program Kokurikuler Noken dinilai berpotensi menjadi model pembelajaran berbasis budaya lokal yang dapat diterapkan secara lebih luas pada satuan pendidikan di Papua. 5. BPP akan mengkaji peluang dukungan melalui fungsi sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi dengan kementerian/lembaga serta pemangku kepentingan terkait.	1. Mengidentifikasi alternatif sumber pendanaan bagi keberlanjutan Program Kokurikuler Noken. 2. Memfasilitasi finalisasi buku ajar, panduan pembelajaran, dan RPP bersama Tim Pengembang BGTK Provinsi Papua. 3. Mendukung pelaksanaan pelatihan guru menggunakan model IN-OCT-IN2. 4. Menyiapkan pelaksanaan seminar diseminasi setelah perangkat pembelajaran selesai disusun serta memperkuat koordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan terkait untuk mendukung implementasi Program Kokurikuler Noken secara berkelanjutan.	
2	Audiensi dan pemaparan profil serta program Yayasan Nusantara Sehati (YNS) kepada BPP. 3 Juli 2026	Yayasan Nusantara Sehati (YNS) memaparkan profil kelembagaan, pengalaman pelaksanaan program di bidang pendidikan, tata kelola, dan pembangunan wilayah, serta menjajaki peluang sinergi dan dukungan BPP dalam pengembangan program pemberdayaan masyarakat, khususnya di Papua.	1. YNS menyampaikan pengalaman pelaksanaan berbagai program peningkatan kapasitas guru, penguatan kepemimpinan sekolah, pengembangan pembelajaran holistik, serta pemberdayaan masyarakat di berbagai daerah Indonesia. 2. YNS memaparkan pendekatan pelaksanaan program yang berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan, tata kelola, dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. 3. BPP memperoleh gambaran mengenai kapasitas, rekam jejak, dan potensi kontribusi YNS sebagai mitra dalam mendukung program pembangunan sumber daya manusia di Papua. 4. Terbangun komunikasi awal untuk menjajaki kemungkinan kolaborasi pada program-program yang sejalan dengan tugas dan fungsi BPP.	1. BPP melakukan kajian terhadap peluang kerja sama dengan YNS sesuai prioritas pembangunan Papua. 2. Mengidentifikasi program-program YNS yang dapat disinergikan dengan agenda pembangunan Papua, khususnya pada bidang pendidikan, penguatan kapasitas SDM, dan pemberdayaan masyarakat. 3. Melakukan koordinasi lanjutan dengan YNS dan pemangku kepentingan terkait apabila terdapat program yang memerlukan dukungan sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi oleh BPP.	



3	Konsultasi dan Pembahasan Peluang Kerja Sama Pendidikan antara BPP dan DPRP dengan Akademi Prestasi dan Koding Next. 6 Juli 2026	Membahas peluang kerja sama dalam peningkatan kualitas SDM Papua melalui program pelatihan Artificial Intelligence (AI), coding, dan sertifikasi profesi, serta mengidentifikasi mekanisme implementasi program di satuan pendidikan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah.	1. Terbangun kesamaan pemahaman mengenai potensi kerja sama strategis antara BPP, Akademi Prestasi, dan Koding Next dalam pengembangan kompetensi SDM Papua. 2. Program pelatihan AI, coding, dan sertifikasi profesi dinilai relevan untuk mendukung peningkatan kapasitas guru, peserta didik, aparatur, dan generasi muda Papua. 3. BPP menyatakan komitmen untuk menjajaki pengembangan program di enam provinsi di Papua melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan satuan pendidikan. 4. Disepakati perlunya penyusunan Nota Kesepahaman (MoU) sebagai dasar pelaksanaan kerja sama serta pelaksanaan pertemuan lanjutan untuk membahas mekanisme implementasi dan penetapan sekolah percontohan (pilot project).	1. Menyusun draft Nota Kesepahaman (MoU) sebagai dasar pelaksanaan kerja sama antara BPP dengan Akademi Prestasi dan Koding Next. 2. Menindaklanjuti pembahasan teknis mengenai implementasi program, termasuk mekanisme pendanaan melalui RKAS dan Dana BOS sesuai ketentuan yang berlaku. 3. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk mengidentifikasi sekolah percontohan sebagai lokasi awal pelaksanaan program. 4. Mendorong pengembangan program pelatihan AI, coding, dan sertifikasi profesi secara bertahap sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas SDM di enam provinsi di Papua.	
4	Audiensi bersama Tokoh Adat Suku Besar Kabupaten Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah mengenai Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam dan Pemberdayaan Masyarakat Adat. 7 Juli 2026	Menerima dan membahas aspirasi serta usulan Tokoh Adat Suku Besar mengenai pengembangan potensi sumber daya alam dan pemberdayaan masyarakat adat, serta mengidentifikasi bentuk dukungan BPP sesuai tugas dan fungsinya dalam percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua.	1. Tokoh Adat Suku Besar Dedai Ihoada menyampaikan aspirasi serta proposal pengembangan potensi wilayah adat sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat. 2. BPP memperoleh gambaran mengenai potensi wilayah, kebutuhan, dan harapan masyarakat adat terhadap dukungan pemerintah dalam pengembangan wilayah. 3. BPP menjelaskan tugas dan fungsi kelembagaan dalam melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan di Papua. 4. Disepakati pentingnya koordinasi lanjutan dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait sesuai substansi usulan yang disampaikan.	1. Melakukan telaah terhadap proposal yang disampaikan Tokoh Adat sebagai bahan koordinasi dan evaluasi di lingkungan BPP. 2. Mengidentifikasi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan terhadap substansi usulan. 3. Memfasilitasi koordinasi lanjutan dengan pemangku kepentingan terkait untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat adat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Mengawal tindak lanjut usulan yang sejalan dengan kebijakan percepatan pembangunan dan pemberdayaan Orang Asli Papua melalui fungsi sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi BPP.	



5	Pertemuan bersama Pengusaha Perikanan Tuna terkait Kerja Sama Penyediaan Bahan Pangan bagi PT Pangansari Utama dan PT Freeport Indonesia. 7 Juli 2026	Melakukan koordinasi dengan pengusaha perikanan tuna Orang Asli Papua (OAP) dalam rangka menjajaki peluang kerja sama penyediaan bahan pangan bagi PT Pangansari Utama sebagai penyedia jasa katering PT Freeport Indonesia, serta mengidentifikasi kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan pasokan secara berkelanjutan.	1. Pertemuan belum menghasilkan kesepakatan atau nota kesepahaman (MoU) antara para pihak. 2. Pengusaha perikanan tuna menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi, khususnya terkait keterbatasan sarana dan prasarana penunjang usaha, kapasitas produksi, serta pemenuhan standar kebutuhan pasar untuk memasok bahan pangan kepada PT Pangansari Utama. 3. Para pihak sepakat untuk melanjutkan koordinasi guna mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan dalam mendukung kesiapan pengusaha perikanan tuna Orang Asli Papua.	1. Menginventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana pengusaha perikanan tuna OAP sebagai bahan rekomendasi kepada pemerintah dan pihak terkait. 2. Melakukan pemantauan tindak lanjut kerja sama sebagai bagian dari implementasi kebijakan afirmatif bagi pelaku usaha Orang Asli Papua.	
6	Koordinasi dan penjajakan kerja sama antara BPP dengan Bank BOSNIK terkait akses penguatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha Orang Asli Papua (OAP). 7 Juli 2026	Membangun sinergi antara BPP dan Bank BOSNIK dalam mendukung pemberdayaan ekonomi Orang Asli Papua melalui peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM dan jasa konstruksi, serta memperkenalkan peran BPP dalam percepatan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua.	1. BPP menyampaikan tugas dan fungsi kelembagaan dalam melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua. 2. Bank BOSNIK memaparkan profil kelembagaan serta perannya dalam penyaluran kredit kepada pelaku UMKM dan jasa konstruksi Orang Asli Papua. 3. Terbangun kesamaan pemahaman mengenai pentingnya perluasan akses pembiayaan sebagai upaya mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat OAP. 4. Bank BOSNIK menyampaikan harapan untuk membangun kerja sama dengan BPP dalam mendukung pengembangan pembiayaan bagi pelaku usaha Orang Asli Papua.	1. Menindaklanjuti hasil koordinasi melalui pembahasan lebih lanjut mengenai ruang lingkup dan bentuk kerja sama antara BPP dan Bank BOSNIK. 2. Mengidentifikasi program pembiayaan yang dapat mendukung pengembangan UMKM dan jasa konstruksi Orang Asli Papua. 3. Mendorong koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha OAP. 4. Menyusun rencana tindak lanjut sebagai dasar pengembangan kemitraan yang mendukung pemberdayaan ekonomi Orang Asli Papua secara berkelanjutan.	



7	Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Kongres Bahasa Daerah 2026. 9 Juli 2026	Melakukan evaluasi terhadap perkembangan persiapan Kongres Bahasa Daerah (KBD) Tahun 2026, memastikan tindak lanjut koordinasi dengan pemerintah daerah, serta menyusun langkah strategis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan.	1. Tim Balai Bahasa menyampaikan perkembangan persiapan pelaksanaan Kongres Bahasa Daerah Tahun 2026, khususnya terkait koordinasi dengan pemerintah daerah di masing-masing wilayah. 2. Dilakukan konfirmasi mengenai status surat dan hasil koordinasi kepada kepala daerah untuk mengetahui apakah telah memperoleh persetujuan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. 3. Dibahas rencana tindak lanjut apabila proses persetujuan belum selesai, termasuk opsi penugasan tim dari Balai Bahasa Pusat untuk melakukan koordinasi secara langsung dengan para kepala daerah guna membahas dukungan dan kesiapan pelaksanaan Kongres Bahasa Daerah. 4. Disepakati bahwa akan dilaksanakan rapat koordinasi secara daring (Zoom Meeting) setiap minggu sebagai forum untuk menyampaikan perkembangan, berbagi informasi, mengevaluasi progres, serta menyelesaikan kendala yang dihadapi oleh masing-masing wilayah selama proses persiapan Kongres Bahasa Daerah Tahun 2026. 5. Seluruh peserta sepakat untuk terus memperkuat komunikasi dan koordinasi antarinstansi agar seluruh tahapan persiapan dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.	1. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap tindak lanjut surat dan proses persetujuan dari pemerintah daerah. 2. Apabila diperlukan, Balai Bahasa Pusat agar melakukan koordinasi langsung dengan kepala daerah untuk mempercepat proses persetujuan dan memperoleh dukungan terhadap penyelenggaraan Kongres Bahasa Daerah Tahun 2026. 3. Melaksanakan rapat koordinasi mingguan secara konsisten untuk memantau perkembangan persiapan, mengidentifikasi hambatan, dan memastikan tindak lanjut yang telah disepakati dapat terlaksana tepat waktu. 4. Memperkuat sinergi antara BP3OKP, Balai Bahasa Provinsi Papua, dan pemerintah daerah guna memastikan seluruh persiapan Kongres Bahasa Daerah Tahun 2026 berjalan optimal dan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.	 
8	Rapat Koordinasi Pembahasan Persiapan Pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). 10 Juli 2026	Melakukan koordinasi dan pembahasan penyelesaian persyaratan administrasi sebagai persiapan pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kabupaten Keerom.	Dalam pertemuan dibahas langkah-langkah penyelesaian persyaratan administrasi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Selain itu, telah dibentuk tim administrasi pada Koperasi Onomi Madani Papua yang bertugas melakukan pengelolaan dan pendataan petani serta lahan perkebunan sawit di Kabupaten Keerom sebagai bagian dari proses verifikasi dan pemenuhan persyaratan program.	Perlu dilakukan pendampingan dan koordinasi secara berkelanjutan antara BP3OKP, Dinas Pertanian Kabupaten Keerom, APKASINDO, dan Koperasi Onomi Madani Papua guna memastikan seluruh persyaratan administrasi, pendataan petani, dan verifikasi lahan dapat diselesaikan tepat waktu sehingga pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dapat berjalan sesuai ketentuan.	



9	Pokja Papua Polhukam dan Pokja Papua Produktif bersama Komunitas Pengusaha Jasa Tabi Saireri terkait Pemberdayaan Pengusaha Orang Asli Papua (OAP) melalui Pembagian Pekerjaan Subkontrak pada Pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Biak. 13 Juli 2026	Menindaklanjuti hasil pembahasan sebelumnya dengan melakukan koordinasi bersama Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Prasarana Strategis Papua terkait pelaksanaan kebijakan afirmatif bagi Pengusaha Orang Asli Papua (OAP) dalam pekerjaan subkontrak pembangunan Sekolah Rakyat.	1. BPP bersama Komunitas Pengusaha Jasa Tabi Saireri melakukan koordinasi lanjutan dengan Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Papua mengenai perkembangan pembagian pekerjaan subkontrak bagi Pengusaha OAP. 2. Satker menyampaikan bahwa hingga saat ini belum dapat memberikan jadwal pertemuan maupun arahan tindak lanjut karena pimpinan Satker masih berada di luar Kota Jayapura. 3. Pembahasan mengenai mekanisme pelibatan Pengusaha OAP sebagai subkontraktor belum dapat dilanjutkan dan menunggu kesiapan pihak Satker.	1. Melakukan koordinasi kembali dengan Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Papua setelah pimpinan Satker kembali ke Jayapura. 2. Mendorong percepatan pembahasan mekanisme pelibatan Pengusaha Orang Asli Papua sebagai subkontraktor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Mengawal tindak lanjut koordinasi bersama PT Waskita Karya, Satker, dan pemangku kepentingan terkait guna memastikan implementasi kebijakan afirmatif bagi Pengusaha Orang Asli Papua dalam pelaksanaan pembangunan Sekolah Rakyat.	
10	Pertemuan Badan Pengarah Papua (BPP) bersama Mantan Bupati Kabupaten Jayapura terkait Pemetaan Wilayah Adat dan Penguatan Perlindungan Hak Orang Asli Papua (OAP). 13 Juli 2026	Melakukan koordinasi dan diskusi mengenai percepatan pemetaan wilayah adat, penguatan perlindungan hak Orang Asli Papua (OAP), serta peran Badan Pengarah Papua dalam mendorong implementasi kebijakan terkait pengakuan masyarakat hukum adat.	1. Dibahas pentingnya percepatan pemetaan wilayah adat sebagai dasar pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat. 2. Dibahas upaya penguatan perlindungan hak Orang Asli Papua (OAP) melalui pengakuan wilayah adat dan regulasi daerah. 3. Disampaikan peran Badan Pengarah Papua dalam mendorong sinkronisasi dan koordinasi percepatan pengakuan wilayah adat di Tanah Papua.	1. Melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk mendorong pembentukan Tim Pemetaan Wilayah Adat melalui Peraturan Daerah atau kebijakan daerah. 2. Mendorong identifikasi dan verifikasi wilayah adat prioritas sebagai dasar proses pengakuan masyarakat hukum adat. 3. Mengawal percepatan penerbitan Surat Keputusan (SK) pengakuan wilayah adat oleh Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sesuai kewenangannya.	



11	Pertemuan Lanjutan bersama Tokoh Adat Suku Besar Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Mamberamo Tengah terkait Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam dan Pemberdayaan Masyarakat Adat. Pengusaha. 13 Juli 2026	Menindaklanjuti hasil audiensi sebelumnya antara Badan Pengarah Papua (BPP) dengan Tokoh Adat Suku Besar Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Mamberamo Tengah. Membahas potensi pengembangan sumber daya alam yang dapat dikelola secara berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama pembangunan. Mengidentifikasi kebutuhan dukungan pemerintah serta menyelaraskan aspirasi masyarakat adat dengan program percepatan pembangunan di wilayah Papua.	1. Tokoh adat menyampaikan potensi sumber daya alam di wilayah Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Mamberamo Tengah yang dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat. 2. Dilakukan pembahasan mengenai penguatan peran masyarakat adat dalam pengelolaan potensi sumber daya alam dengan tetap memperhatikan nilai-nilai adat, kelestarian lingkungan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Badan Pengarah Papua menerima aspirasi dan usulan dari tokoh adat sebagai bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah terkait.	1. Tokoh adat diminta melengkapi dokumen dan data pendukung terkait potensi wilayah serta usulan program yang akan diajukan sebagai bahan pembahasan lebih lanjut. 2. Badan Pengarah Papua akan melakukan tindak lanjut melalui fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) guna mendorong pengembangan potensi sumber daya alam yang berpihak pada pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat adat.	
12	Rapat Koordinasi Perbaikan Tatakelola dan Pencegahan Korupsi Dana Otsus se-wilayah Tanah Papua. 16 Juli 2026	1. Memperkuat komitmen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tata kelola Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang transparan, akuntabel, efektif, dan berintegritas. 2. Meningkatkan koordinasi antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta pemangku kepentingan dalam pengawasan pengelolaan Dana Otsus. 3. Menyepakati langkah-langkah strategis untuk memperkuat sistem pengelolaan, pengawasan, dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan Dana Otsus di Tanah Papua.	1. Ditandatangani Deklarasi Komitmen Bersama pengelolaan Dana Otsus oleh para kepala daerah di Tanah Papua. 2. Disepakati percepatan penyusunan Perdasus, penguatan pengawasan APIP, pembentukan Task Force Pembangunan Papua, dan peningkatan transparansi pengelolaan Dana Otsus. 3. KPK menekankan pentingnya implementasi komitmen melalui penguatan integritas dan pencegahan korupsi.	1. Mempercepat penyusunan regulasi dan penguatan pengawasan pengelolaan Dana Otsus. 2. Meningkatkan koordinasi antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, KPK, dan Badan Pengarah Papua dalam pelaksanaan pengawasan. 3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan komitmen yang telah disepakati.	 



13	Pembahasan Pemanfaatan Buangan Air Danau Sentani untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) bersama konsultan perencanaan pembangunan PLTA di Yokiwa, bersama Ondolo Yokiwa 22 Juli 2026	Membahas potensi pemanfaatan buangan air Danau Sentani sebagai sumber energi terbarukan yang mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Papua.	1. Disepakati perlunya penyusunan dan pemutakhiran dokumen teknis, penyelesaian hak ulayat, serta pelibatan masyarakat adat sebagai bagian dari persiapan pembangunan PLTA. 2. Pokja Papua Produktif akan mengoordinasikan sinkronisasi program dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait.	Menindaklanjuti penyusunan business plan dan dokumen pendukung, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memfasilitasi penyelesaian hak ulayat dan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat adat guna mendukung implementasi pembangunan PLTA secara berkelanjutan.	
14	Forum Komunikasi dengan Pemangku Kepentingan Utama Provinsi Papua terkait Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 22 Juli 2026	Memastikan pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Provinsi Papua selaras dengan kebijakan Otonomi Khusus Papua serta memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan dalam meningkatkan kepesertaan, kualitas layanan, dan tata kelola pembiayaan JKN.	Diperoleh gambaran kondisi pelaksanaan JKN di Provinsi Papua, termasuk cakupan kepesertaan, kualitas layanan, kendala pembiayaan, dan penguatan sinergi antara BPJS Kesehatan, Pemerintah Provinsi Papua, dan BP3OKP. Disepakati langkah strategis berupa penguatan kepesertaan aktif, percepatan pembayaran iuran, peningkatan fasilitas kesehatan, digitalisasi layanan, serta penyusunan rencana aksi dan mekanisme koordinasi lanjutan.	1. Mengoptimalkan pendataan dan kepesertaan JKN, khususnya bagi Orang Asli Papua (OAP), melalui integrasi data kependudukan dan penguatan Program PESIAR. 2. Memperkuat pembiayaan JKN melalui skema sharing iuran serta menjamin ketepatan pembayaran iuran oleh pemerintah daerah. 3. Meningkatkan kapasitas fasilitas dan tenaga kesehatan, terutama di wilayah terpencil, serta mempercepat digitalisasi layanan dan sistem klaim. 4. Mengintegrasikan program JKN dengan prioritas pembangunan kesehatan daerah dan memperkuat pemanfaatan Dana Otonomi Khusus untuk mendukung akses layanan kesehatan bagi OAP.	



15	Sinergi BP3OKP dan Bank Indonesia dalam Mendukung dan Menyukseskan Program Kokurikuler Noken sebagai Upaya Pelestarian Budaya dan Pemberdayaan Ekonomi Orang Asli Papua (OAP). 23 Juli 2026	Memperkuat sinergi antara BP3OKP, Bank Indonesia, dan para pemangku kepentingan dalam mendukung implementasi Program Kokurikuler Noken sebagai media pelestarian budaya, pendidikan berbasis kearifan lokal, serta pemberdayaan ekonomi Orang Asli Papua.	Disepakati kolaborasi antara BP3OKP dan Bank Indonesia untuk mendukung implementasi Program Kokurikuler Noken melalui penguatan literasi keuangan, digitalisasi, pengembangan UMKM pengrajin Noken, serta penyusunan rencana kerja bersama guna mendukung pelestarian budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.	Menyusun work plan dan roadmap pelaksanaan Program Kokurikuler Noken, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta mengoptimalkan dukungan Bank Indonesia melalui pelatihan, literasi keuangan, digitalisasi UMKM, dan pemberdayaan pengrajin Noken agar program dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi Orang Asli Papua.	
16	Rapat Pemantauan Progres Persiapan Peserta Intersip Periode Agustus 2026 & Arahan Kementerian Kesehatan RI. 24 Juli 2026	Melaksanakan pemantauan terhadap progres persiapan pelaksanaan Program Internship Dokter dan Dokter Gigi Periode Agustus 2026 di Tanah Papua serta memperkuat koordinasi antara Kementerian Kesehatan, BP3OKP, dan pemerintah daerah guna memastikan kesiapan peserta, wahana internship, dan dukungan pelaksanaan program.	Disepakati percepatan penetapan wahana internship di Papua, penguatan koordinasi antara Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, dan BP3OKP, optimalisasi pendataan serta pendampingan peserta asal Papua, penyelesaian kendala teknis pada sistem pendaftaran, serta dukungan pembiayaan dan insentif guna mendukung pemerataan tenaga kesehatan di Tanah Papua.	Mendorong percepatan penetapan wahana internship di Papua, penguatan koordinasi antara Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, dan BP3OKP, optimalisasi pendataan dan pendampingan peserta asal Papua, penyelesaian kendala teknis sistem pendaftaran, serta memastikan dukungan pembiayaan dan insentif guna meningkatkan pemerataan tenaga kesehatan di Tanah Papua.	



17	Menjadi Narasumber Kegiatan Analisa dan Evaluasi Inpoleksosbudkamnegsus T.A.2026. 27 Juli 2026	Menjadi Narasumber pada Kegiatan Analisa dan Evaluasi Ipoleksosbudkamnegsus Direktorat Intelijen Keamanan (Ditintelkam) Polda Papua Tahun Anggaran 2026.	Menyampaikan materi mengenai transformasi peran intelijen dalam mendukung percepatan pembangunan di Papua serta memperkuat sinergi antara Badan Pengarah Papua (BPP), Kepolisian, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas keamanan dan mendukung implementasi Otonomi Khusus Papua.	Memperkuat koordinasi antara BPP, Polri, pemerintah daerah, dan kementerian/lembaga dalam pelaksanaan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK), meningkatkan transparansi pengelolaan Dana Otonomi Khusus, mengoptimalkan pemberdayaan ekonomi masyarakat Orang Asli Papua, serta mendukung penyelesaian isu-isu strategis melalui pendekatan keamanan, pembangunan, dan kesejahteraan secara terpadu.	
18	Audiensi bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura terkait Pengawasan dan Pendampingan Program Pendidikan. 27 Juli 2026	Membahas tata kelola Dana Otonomi Khusus bidang pendidikan, peningkatan kesejahteraan guru honorer, serta validasi data yayasan pelopor sebagai dasar penyusunan kebijakan dan penganggaran pendidikan di Kabupaten Jayapura.	Diperoleh kesepahaman bahwa permasalahan utama sektor pendidikan di Kabupaten Jayapura terletak pada tata kelola dan validitas data, bukan pada keterbatasan anggaran. Disepakati pentingnya validasi data sekolah, guru, dan sarana prasarana, optimalisasi pemanfaatan Dana Otsus sesuai ketentuan, penguatan dukungan terhadap lima yayasan pelopor pendidikan, serta peningkatan pengawasan terhadap lembaga pendidikan yang tidak memenuhi standar.	Melakukan validasi dan pemutakhiran data pendidikan secara menyeluruh, memperkuat tata kelola Dana Otsus bidang pendidikan sesuai regulasi, meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan yayasan pelopor dalam penyusunan kebutuhan anggaran, serta memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan guna meningkatkan mutu layanan pendidikan bagi masyarakat Papua.	



19	Anggota BPP Menjadi Narasumber kegiatan Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 29 Juli 2026	1. Meningkatkan pemahaman peserta mengenai konsep Ekonomi Budaya Papua melalui penguatan peran klan/marga sebagai aktor pembangunan. 2. Mendorong sinergi antara pemerintah, masyarakat adat, akademisi, dan pemangku kepentingan dalam pemberdayaan Orang Asli Papua berbasis kearifan lokal.	1. Disampaikan materi mengenai konsep Ekonomi Budaya Papua, peran strategis klan/marga sebagai aktor pembangunan, model kelembagaan ekonomi masyarakat adat, serta penerapannya dalam pengelolaan potensi wilayah. 2. Peserta memperoleh pemahaman mengenai pentingnya penguatan kelembagaan masyarakat adat, kemitraan yang berkeadilan, dan pemberdayaan Orang Asli Papua sebagai bagian dari pembangunan yang berkelanjutan.	1. Mendorong penguatan kelembagaan masyarakat adat sebagai pelaku pembangunan ekonomi. 2. Meningkatkan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat adat dalam pengembangan ekonomi budaya Papua. 3. Menyusun tindak lanjut melalui program pemberdayaan yang mendukung peningkatan kapasitas dan kesejahteraan Orang Asli Papua.	
20	Rapat Koordinasi Implementasi Kebijakan Afirmatif Pelaku Usaha Orang Asli Papua (OAP) pada Pembangunan Sekolah Rakyat bersama Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Papua. 29 Juli 2026	Melakukan koordinasi terkait pelaksanaan Program Sekolah Rakyat di Kabupaten Sarmi, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Biak Numfor, khususnya mengenai mekanisme tender, pelaksana pekerjaan, serta daftar perusahaan dan pelaku usaha Orang Asli Papua (OAP) yang dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan.	1. Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Papua menjelaskan bahwa proses pengadaan pekerjaan pembangunan Sekolah Rakyat dilaksanakan melalui mekanisme tender secara elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui aplikasi pengadaan pemerintah. 2. Dalam rapat disampaikan bahwa data mengenai perusahaan pelaksana, hasil proses pengadaan, serta keterlibatan perusahaan maupun tenaga kerja Orang Asli Papua (OAP) pada pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Sarmi, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Biak Numfor masih memerlukan penelusuran lebih lanjut. 3. Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Papua berkomitmen untuk melakukan koordinasi internal dan menyampaikan data dimaksud kepada Badan Pengarah Papua sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kebijakan afirmatif bagi pelaku usaha Orang Asli Papua.	1. Badan Pengarah Papua perlu melakukan koordinasi lanjutan dengan Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Papua untuk memperoleh data rinci mengenai perusahaan pelaksana pekerjaan, mekanisme pengadaan, serta keterlibatan pelaku usaha dan tenaga kerja Orang Asli Papua (OAP) dalam pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Sarmi, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Biak Numfor. 2. Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Papua diharapkan menyampaikan daftar perusahaan pelaksana beserta bentuk keterlibatan perusahaan dan tenaga kerja Orang Asli Papua (OAP) sebagai bahan pemantauan pelaksanaan kebijakan afirmatif. 3. Hasil koordinasi tersebut agar menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi Badan Pengarah Papua dalam mendorong optimalisasi implementasi kebijakan afirmatif bagi pelaku usaha Orang Asli Papua pada pelaksanaan proyek strategis pemerintah di Tanah Papua.	



21	Dialog Strategis Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Bappenas bersama Gubernur dan Bupati/Wali Kota se-Tanah Papua melalui. 30 Juli 2026	Menyelaraskan arah pembangunan Papua antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui integrasi dokumen perencanaan dengan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP), memperkuat implementasi Otonomi Khusus Papua, mengidentifikasi hambatan pembangunan, serta meningkatkan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan Papua.	Dialog menghasilkan komitmen bersama untuk menyelaraskan dokumen perencanaan daerah dengan RAPPP, memperkuat tata kelola dan optimalisasi Dana Otonomi Khusus, meningkatkan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah, memperkuat pelayanan dasar di bidang kesehatan dan pendidikan, membentuk Tim Asistensi lintas kementerian, serta meningkatkan koordinasi dan evaluasi pembangunan Papua secara berkala guna mendukung percepatan pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan.	1. Meningkatkan sinkronisasi dokumen perencanaan daerah dengan RAPPP dan sistem informasi pembangunan Papua. 2. Mengoptimalkan pemanfaatan Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur (DTI), DAK, dan sumber pendanaan lainnya secara efektif, transparan, dan tepat sasaran. 3. Mempercepat pembangunan infrastruktur strategis, peningkatan konektivitas, serta pemerataan pelayanan kesehatan dan pendidikan. 4. Memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan Tim Asistensi untuk mendukung percepatan pembangunan Papua. 5. Menyusun rekomendasi strategis sebagai bahan pembahasan dalam Rapat Badan Pengarah Papua yang dipimpin Wakil Presiden RI serta melaksanakan evaluasi pembangunan Papua secara berkala.	 
22	Rapat Pembahasan Buku Model Pembelajaran Mendalam Berbasis Kearifan Lokal Papua. 30 Juli 2026	Menyusun Buku Model Pembelajaran Mendalam (KOKURIKULER) untuk bisa digunakan pada satuan pendidikan mulai dari TK/PAUD hingga SMA/SMK	1. Draf Buku sedang dipersiapkan Tim Penyusun (termasuk BP3OKP Provinsi Papua : Pokja Papua Cerdas) dengan tenggang waktu sebelum peluncuran pada tanggal 25 Agustus 2026. 2. BP3OKP memberikan Inputan secara menyeluruh namun juga pada Bagian Filosofi-Dasar Hukum dan Keberlanjutan Pembelajaran mendalam ini dalam hal peran pemerintah daerah.	1. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Papua (Gubernur Papua) untuk hadir dalam agenda peluncuran buku dan mempersiapkan keberlanjutan program ini. 2. Rapat Internal POKJA untuk membahas penyusunan buku.	

POKJA PAPUA POLHUKAM



JULI 2026

Badan Pengarah Papua
Perwakilan Provinsi Papua



**PELAKSANAAN KEGIATAN STRATEGIS
KELOMPOK KERJA PAPUA POLHUKAM
BPP/BP3OKP PROVINSI PAPUA
PADA BULAN JULI 2026**

No	Kegiatan Strategis	Tujuan	Hasil	Rekomendasi	Dokumentasi
1	Audiensi bersama Tokoh Adat Suku Besar Kabupaten Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah mengenai Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam dan Pemberdayaan Masyarakat Adat. 7 Juli 2026	Menerima dan membahas aspirasi serta usulan Tokoh Adat Suku Besar mengenai pengembangan potensi sumber daya alam dan pemberdayaan masyarakat adat, serta mengidentifikasi bentuk dukungan BPP sesuai tugas dan fungsinya dalam percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua.	1. Tokoh Adat Suku Besar Dedai Ihoadai menyampaikan aspirasi serta proposal pengembangan potensi wilayah adat sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat. 2. BPP memperoleh gambaran mengenai potensi wilayah, kebutuhan, dan harapan masyarakat adat terhadap dukungan pemerintah dalam pengembangan wilayah. 3. BPP menjelaskan tugas dan fungsi kelembagaan dalam melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan di Papua. 4. Disepakati pentingnya koordinasi lanjutan dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait sesuai substansi usulan yang disampaikan.	1. Melakukan telaah terhadap proposal yang disampaikan Tokoh Adat sebagai bahan koordinasi dan evaluasi di lingkungan BPP. 2. Mengidentifikasi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan terhadap substansi usulan. 3. Memfasilitasi koordinasi lanjutan dengan pemangku kepentingan terkait untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat adat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Mengawal tindak lanjut usulan yang sejalan dengan kebijakan percepatan pembangunan dan pemberdayaan Orang Asli Papua melalui fungsi sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi BPP.	
2	Pokja Papua Polhukam dan Pokja Papua Produktif bersama Komunitas Pengusaha Jasa Tabi Saireri terkait Pemberdayaan Pengusaha Orang Asli Papua (OAP) melalui Pembagian Pekerjaan Subkontrak pada Pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Biak. 13 Juli 2026	Menindaklanjuti hasil pembahasan sebelumnya dengan melakukan koordinasi bersama Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Prasarana Strategis Papua terkait pelaksanaan kebijakan afirmatif bagi Pengusaha Orang Asli Papua (OAP) dalam pekerjaan subkontrak pembangunan Sekolah Rakyat.	1. BPP bersama Komunitas Pengusaha Jasa Tabi Saireri melakukan koordinasi lanjutan dengan Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Papua mengenai perkembangan pembagian pekerjaan subkontrak bagi Pengusaha OAP. 2. Satker menyampaikan bahwa hingga saat ini belum dapat memberikan jadwal pertemuan maupun arahan tindak lanjut karena pimpinan Satker masih berada di luar Kota Jayapura. 3. Pembahasan mengenai mekanisme pelibatan Pengusaha OAP sebagai subkontraktor belum dapat dilanjutkan dan menunggu kesiapan pihak Satker.	1. Melakukan koordinasi kembali dengan Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Papua setelah pimpinan Satker kembali ke Jayapura. 2. Mendorong percepatan pembahasan mekanisme pelibatan Pengusaha Orang Asli Papua sebagai subkontraktor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Mengawal tindak lanjut koordinasi bersama PT Waskita Karya, Satker, dan pemangku kepentingan terkait guna memastikan implementasi kebijakan afirmatif bagi Pengusaha Orang Asli Papua dalam pelaksanaan pembangunan Sekolah Rakyat.	 



3	Mendampingi Anggota Badan Pengarah Papua Provinsi Papua sebagai narasumber pada Kegiatan Analisa dan Evaluasi Ipoleksosbudkamnegsus Direktorat Intelijen Keamanan (Ditintelkam) Polda Papua Tahun Anggaran 2026. 27 Juli 2026	Mendukung pelaksanaan tugas Anggota Badan Pengarah Papua sebagai narasumber serta memperkuat koordinasi dengan Direktorat Intelijen Keamanan (Ditintelkam) Polda Papua dalam mendukung stabilitas keamanan dan percepatan pembangunan di Tanah Papua.	Anggota Badan Pengarah Papua menyampaikan materi mengenai transformasi peran intelijen dalam mendukung pembangunan, implementasi Otonomi Khusus Papua, pengelolaan Dana Otonomi Khusus, serta sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas keamanan. Melalui diskusi, diperoleh masukan terkait penguatan koordinasi, optimalisasi pemanfaatan Dana Otonomi Khusus, serta pendekatan kolaboratif dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Orang Asli Papua.	Melakukan koordinasi lanjutan antara Badan Pengarah Papua, Ditintelkam Polda Papua, pemerintah daerah, dan kementerian/lembaga terkait untuk mendukung pelaksanaan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK), meningkatkan transparansi pengelolaan Dana Otonomi Khusus, serta memperkuat pemberdayaan masyarakat Orang Asli Papua dalam mendukung pembangunan yang aman, inklusif, dan berkelanjutan.	
4	Mendampingi Anggota BPP pada kegiatan Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 29 Juli 2026	1. Mendampingi Anggota BPP dalam penyampaian materi mengenai pembangunan ekonomi budaya Papua berbasis masyarakat adat kepada civitas akademika. 2. Memperkuat sinergi antara Badan Pengarah Papua, perguruan tinggi, mahasiswa, dan pemangku kepentingan dalam mendukung percepatan pembangunan Papua.	1. Anggota BPP menyampaikan materi mengenai konsep Ekonomi Budaya Papua, penguatan peran klan/marga sebagai aktor pembangunan, serta pemberdayaan Orang Asli Papua melalui pendekatan berbasis budaya. 2. Terjalin diskusi dan pertukaran gagasan antara narasumber dan peserta mengenai penguatan kelembagaan masyarakat adat, kemitraan pembangunan, dan implementasi Otonomi Khusus Papua.	1. Memperkuat kerja sama antara Badan Pengarah Papua dengan perguruan tinggi dalam pengembangan kajian dan program pembangunan Papua. 2. Mendorong pelibatan mahasiswa sebagai mitra dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi budaya Papua. 3. Mengembangkan tindak lanjut berupa kolaborasi program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua.	



5	Rapat Koordinasi Implementasi Kebijakan Afirmatif Pelaku Usaha Orang Asli Papua (OAP) pada Pembangunan Sekolah Rakyat bersama Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Papua. 29 Juli 2026	Melakukan koordinasi terkait pelaksanaan Program Sekolah Rakyat di Kabupaten Sarmi, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Biak Numfor, khususnya mengenai mekanisme tender, pelaksana pekerjaan, serta daftar perusahaan dan pelaku usaha Orang Asli Papua (OAP) yang dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan.	1. Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Papua menjelaskan bahwa proses pengadaan pekerjaan pembangunan Sekolah Rakyat dilaksanakan melalui mekanisme tender secara elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui aplikasi pengadaan pemerintah. 2. Dalam rapat disampaikan bahwa data mengenai perusahaan pelaksana, hasil proses pengadaan, serta keterlibatan perusahaan maupun tenaga kerja Orang Asli Papua (OAP) pada pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Sarmi, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Biak Numfor masih memerlukan penelusuran lebih lanjut. 3. Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Papua berkomitmen untuk melakukan koordinasi internal dan menyampaikan data dimaksud kepada Badan Pengarah Papua sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kebijakan afirmatif bagi pelaku usaha Orang Asli Papua.	1. Badan Pengarah Papua perlu melakukan koordinasi lanjutan dengan Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Papua untuk memperoleh data rinci mengenai perusahaan pelaksana pekerjaan, mekanisme pengadaan, serta keterlibatan pelaku usaha dan tenaga kerja Orang Asli Papua (OAP) dalam pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Sarmi, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Biak Numfor. 2. Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Papua diharapkan menyampaikan daftar perusahaan pelaksana beserta bentuk keterlibatan perusahaan dan tenaga kerja Orang Asli Papua (OAP) sebagai bahan pemantauan pelaksanaan kebijakan afirmatif. 3. Hasil koordinasi tersebut agar menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi Badan Pengarah Papua dalam mendorong optimalisasi implementasi kebijakan afirmatif bagi pelaku usaha Orang Asli Papua pada pelaksanaan proyek strategis pemerintah di Tanah Papua.	
6	Dialog Strategis Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Bappenas bersama Gubernur dan Bupati/Wali Kota se-Tanah Papua melalui zoom. 30 Juli 2026	Menyelaraskan arah pembangunan Papua antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui integrasi dokumen perencanaan dengan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP), memperkuat implementasi Otonomi Khusus Papua, mengidentifikasi hambatan pembangunan, serta meningkatkan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan Papua.	Dialog menghasilkan komitmen bersama untuk menyelaraskan dokumen perencanaan daerah dengan RAPPP, memperkuat tata kelola dan optimalisasi Dana Otonomi Khusus, meningkatkan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah, memperkuat pelayanan dasar di bidang kesehatan dan pendidikan, membentuk Tim Asistensi lintas kementerian, serta meningkatkan koordinasi dan evaluasi pembangunan Papua secara berkala guna mendukung percepatan pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan.	1. Meningkatkan sinkronisasi dokumen perencanaan daerah dengan RAPPP dan sistem informasi pembangunan Papua. 2. Mengoptimalkan pemanfaatan Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur (DTI), DAK, dan sumber pendanaan lainnya secara efektif, transparan, dan tepat sasaran. 3. Mempercepat pembangunan infrastruktur strategis, peningkatan konektivitas, serta pemerataan pelayanan kesehatan dan pendidikan. 4. Memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan Tim Asistensi untuk mendukung percepatan pembangunan Papua. 5. Menyusun rekomendasi strategis sebagai bahan pembahasan dalam Rapat Badan Pengarah Papua yang dipimpin Wakil Presiden RI serta melaksanakan evaluasi pembangunan Papua secara berkala.	

TENTANG BPP

BPP melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan di Papua dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus Papua untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua secara berkeadilan dan berkelanjutan.



6
KEGIATAN STRATEGIS
Dilaksanakan



HARI AKTIVITAS
6, 7, 13, 27
Juli 2026



PIHAK TERLIBAT
Instansi & Mitra



HASIL & REKOMENDASI
Tindak Lanjut

RINGKASAN KEGIATAN STRATEGIS JULI 2026

1 Audiensi Tokoh Adat Suku Besar Mamberamo Raya & Mamberamo Tengah

7 Juli 2026



- Tokoh adat menyampaikan aspirasi dan proposal pengembangan wilayah adat.
- BPP memperoleh masukan mengenai potensi wilayah dan kebutuhan masyarakat adat.
- BPP menjelaskan peran SHEK dalam mendukung percepatan pembangunan.
- Disepakati koordinasi lanjutan dengan instansi terkait.

REKOMENDASI

- Menelaah proposal sebagai bahan koordinasi BPP.
- Mengidentifikasi instansi yang berwenang.
- Memfasilitasi koordinasi lanjutan dan mengawal tindak lanjut usulan.

2 Koordinasi Subkontrak Pengusaha OAP pada Pembangunan Sekolah Rakyat

13 Juli 2026



- Koordinasi lanjutan bersama Satker Prasarana Strategis Papua.
- Pertemuan belum dapat dilaksanakan karena pimpinan Satker berada di luar Jayapura.
- Pembahasan pelibatan Pengusaha OAP menunggu kesiapan Satker.

REKOMENDASI

- Menjadwalkan koordinasi lanjutan dengan Satker.
- Mendorong percepatan pembahasan mekanisme subkontrak OAP.
- Mengawal implementasi kebijakan afirmatif.

3 Narasumber Analisa dan Evaluasi Ditintelkam Polda Papua

27 Juli 2026



- BPP menyampaikan materi Otonomi Khusus dan pembangunan Papua.
- Dibahas penguatan koordinasi lintas sektor.
- Diperoleh masukan terkait optimalisasi Dana Otsus dan pemberdayaan OAP.

REKOMENDASI

- Memperkuat koordinasi BPP dengan Ditintelkam dan pemerintah daerah.
- Mendukung pelaksanaan fungsi SHEK.
- Mendorong pembangunan Papua yang aman dan inklusif.

4 Koordinasi Kebijakan Afirmatif OAP pada Pembangunan Sekolah Rakyat

29 Juli 2026



- Satker menjelaskan proses tender dilakukan secara elektronik.
- Data pelaksana dan keterlibatan OAP masih dalam penelusuran.
- Satker akan menyampaikan data kepada BPP.

REKOMENDASI

- Koordinasi lanjutan untuk memperoleh data pelaksana.
- Memantau keterlibatan perusahaan dan tenaga kerja OAP.
- Menyusun rekomendasi implementasi kebijakan afirmatif.

5 Dialog Strategis Wamen PPN/Bappenas dengan Kepala Daerah se-Tanah Papua (Zoom)

30 Juli 2026



- Disepakati sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah.
- Penguatan tata kelola Dana Otsus dan pelayanan dasar.
- Peningkatan koordinasi lintas kementerian/lembaga.

REKOMENDASI

- Sinkronisasi dokumen perencanaan dengan RAPP.
- Memperkuat koordinasi lintas sektor.
- Menyusun rekomendasi strategis untuk Rapat BPP.



CAPAIAN JULI 2026

- ✓ Menerima aspirasi & masukan positif dari tokoh adat suku besar di Mamberamo Tengah.
- ✓ Memperoleh gambaran potensi wilayah & kebutuhan masyarakat adat.
- ✓ Koordinasi lanjutan dengan pemangku kepentingan terkait kebijakan afirmatif bagi Pengusaha OAP.
- ✓ Penguatan sinergi dengan Polda Papua dalam mendukung stabilitas keamanan & percepatan pembangunan.
- ✓ Tersusunnya rekomendasi & rencana tindak lanjut untuk setiap kegiatan strategis.



KOMITMEN KAMI

- ✓ Terus bersinergi dan berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan.
- ✓ Mewujudkan Papua yang maju, mandiri, dan sejahtera.
- ✓ Mengawal implementasi kebijakan secara efektif, transparan, dan akuntabel.
- ✓ Mendorong pemberdayaan masyarakat adat dan kemandirian ekonomi Papua.
- ✓ Mengakselerasi percepatan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Papua.



TINDAK LANJUT

- ➔ Koordinasi lanjutan dengan K/L, Pemda, dan pemangku kepentingan sesuai substansi usulan.
- ➔ Pengawasan tindak lanjut kebijakan afirmatif bagi Pengusaha OAP dalam proyek strategis di Papua.
- ➔ Evaluasi & monitoring berkelanjutan terhadap rekomendasi dari setiap kegiatan strategis.



SINERGI
Bersama untuk Papua



KOLABORASI
Bergerak dalam Aksi Nyata



INTEGRITAS
Bekerja dengan Amanah



INOVASI
Melahirkan Solusi Berkelanjutan



www.bpp.go.id



Jayapura, Papua



KESIMPULAN KESELURUHAN KEGIATAN KELOMPOK KERJA PAPUA POLHUKAM BPP/BP3OKP PROVINSI PAPUA PADA BULAN JULI 2026

Sepanjang bulan Juli 2026, Kelompok Kerja Papua Polhukam BPP/BP3OKP Provinsi Papua melaksanakan enam kegiatan strategis yang diarahkan pada pengawalan kebijakan afirmatif bagi pelaku usaha Orang Asli Papua, penyaluran aspirasi masyarakat adat, penguatan kemitraan dengan perguruan tinggi, serta peningkatan koordinasi lintas sektor dalam mendukung stabilitas dan percepatan pembangunan di Tanah Papua, dengan uraian sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan afirmatif bagi pelaku usaha Orang Asli Papua pada pembangunan Sekolah Rakyat belum menunjukkan kemajuan.

Koordinasi bersama Komunitas Pengusaha Jasa Tabi Saireri dan Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Papua telah dilakukan dua kali sepanjang bulan Juli. Pada koordinasi pertama, pembahasan mengenai mekanisme pelibatan Pengusaha Orang Asli Papua sebagai subkontraktor belum dapat dilanjutkan karena ketidakhadiran pimpinan Satuan Kerja. Pada koordinasi berikutnya, Satuan Kerja menjelaskan bahwa pengadaan dilaksanakan melalui mekanisme tender elektronik sesuai ketentuan, namun data mengenai perusahaan pelaksana, hasil proses pengadaan, serta keterlibatan perusahaan dan tenaga kerja Orang Asli Papua di Kabupaten Sarmi, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Biak Numfor masih memerlukan penelusuran lebih lanjut dan belum dapat disampaikan. Satuan Kerja berkomitmen menyampaikan data dimaksud kepada Badan Pengarah Papua sebagai bahan evaluasi.

2. Ketiadaan data keterlibatan Orang Asli Papua menjadi hambatan utama pengawasan kebijakan afirmatif.

Selama data pelaksana pekerjaan dan bentuk keterlibatan pelaku usaha serta tenaga kerja Orang Asli Papua belum tersedia, penilaian atas efektivitas kebijakan afirmatif pada proyek strategis pemerintah di Tanah Papua tidak dapat dilakukan secara terukur. Hal ini menjadi perhatian utama Kelompok Kerja pada periode berikutnya.

3. Aspirasi masyarakat adat mengenai pengembangan potensi wilayah telah diterima dan akan ditindaklanjuti.

Audiensi bersama Tokoh Adat Suku Besar dari Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Mamberamo Tengah menghasilkan gambaran mengenai potensi wilayah adat, kebutuhan, serta harapan masyarakat adat terhadap dukungan pemerintah. Badan Pengarah Papua akan menelaah proposal yang disampaikan, mengidentifikasi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang berwenang atas substansi usulan, serta memfasilitasi koordinasi lanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Kemitraan dengan perguruan tinggi diperkuat sebagai jalur pengembangan gagasan pembangunan Papua.

Melalui pendampingan Anggota Badan Pengarah Papua pada kegiatan Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, disampaikan materi mengenai konsep Ekonomi Budaya Papua, penguatan peran klan/marga sebagai aktor pembangunan, serta pemberdayaan Orang Asli Papua melalui pendekatan berbasis budaya. Kegiatan ini membuka peluang kolaborasi program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sekaligus pelibatan mahasiswa Papua sebagai mitra pembangunan di daerah asal.

5. Keselarasan dokumen perencanaan daerah menjadi kerangka bagi seluruh program sektoral.

Dialog Strategis bersama Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas menghasilkan komitmen penyelarasan dokumen perencanaan daerah dengan Rencana Aksi



Percepatan Pembangunan Papua, penguatan tata kelola dan optimalisasi Dana Otonomi Khusus, serta pembentukan Tim Asistensi lintas kementerian.

6. Koordinasi dengan aparat keamanan diperkuat melalui pendekatan pembangunan.

Melalui pendampingan Anggota Badan Pengarah Papua sebagai narasumber pada forum Direktorat Intelijen Keamanan Polda Papua, disampaikan materi mengenai transformasi peran intelijen dalam mendukung pembangunan, implementasi Otonomi Khusus, dan pengelolaan Dana Otonomi Khusus, sekaligus diperoleh masukan mengenai pendekatan kolaboratif dalam pemberdayaan masyarakat Orang Asli Papua.

Secara keseluruhan, kegiatan bulan Juli 2026 memperlihatkan bahwa keberpihakan kepada pelaku usaha Orang Asli Papua pada proyek strategis pemerintah belum sepenuhnya dapat dipastikan pelaksanaannya. Ketersediaan data pelaksana pekerjaan dan bentuk keterlibatan Orang Asli Papua merupakan prasyarat bagi pengawasan yang terukur, sekaligus bagi penyaluran aspirasi masyarakat adat menjadi manfaat ekonomi yang nyata. Pada saat yang sama, penguatan kemitraan dengan perguruan tinggi membuka jalur bagi penyiapan sumber daya manusia Orang Asli Papua yang dibutuhkan dalam pengelolaan potensi wilayah adat.

Hal-hal yang memerlukan perhatian dan arahan lebih lanjut:

1. Penyampaian data perusahaan pelaksana, mekanisme pengadaan, serta keterlibatan pelaku usaha dan tenaga kerja Orang Asli Papua pada pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Sarmi, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Biak Numfor oleh Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Papua.
2. Penegasan mekanisme pelibatan Pengusaha Orang Asli Papua sebagai subkontraktor pada proyek strategis pemerintah di Tanah Papua sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Tindak lanjut atas aspirasi dan proposal masyarakat adat Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Mamberamo Tengah melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang berwenang.
4. Pengembangan kerja sama antara Badan Pengarah Papua dengan perguruan tinggi dalam kajian, penelitian, dan pelibatan mahasiswa Papua bagi pembangunan daerah asal.
5. Penguatan keselarasan dokumen perencanaan daerah dengan RIPP dan RAPPP melalui Tim Asistensi lintas kementerian.

POKJA PAPUA PRODUKTIF



JULI 2026

Badan Pengarah Papua
Perwakilan Provinsi Papua



**PELAKSANAAN KEGIATAN STRATEGIS
KELOMPOK KERJA PAPUA PRODUKTIF
BPP/BP3OKP PROVINSI PAPUA
PADA BULAN JULI 2026**

No	Kegiatan Strategis	Tujuan	Hasil	Rekomendasi	Dokumentasi
1	Konsultasi dan Pembahasan Peluang Kerja Sama Pendidikan antara BPP dan DPRP dengan Akademi Prestasi dan Koding Next. 6 Juli 2026	Membahas peluang kerja sama dalam peningkatan kualitas SDM Papua melalui program pelatihan Artificial Intelligence (AI), coding, dan sertifikasi profesi, serta mengidentifikasi mekanisme implementasi program di satuan pendidikan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah.	1. Terbangun kesamaan pemahaman mengenai potensi kerja sama strategis antara BPP, Akademi Prestasi, dan Koding Next dalam pengembangan kompetensi SDM Papua. 2. Program pelatihan AI, coding, dan sertifikasi profesi dinilai relevan untuk mendukung peningkatan kapasitas guru, peserta didik, aparatur, dan generasi muda Papua. 3. BPP menyatakan komitmen untuk menjajaki pengembangan program di enam provinsi di Papua melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan satuan pendidikan. 4. Disepakati perlunya penyusunan Nota Kesepahaman (MoU) sebagai dasar pelaksanaan kerja sama serta pelaksanaan pertemuan lanjutan untuk membahas mekanisme implementasi dan penetapan sekolah percontohan (pilot project).	1. Menyusun draft Nota Kesepahaman (MoU) sebagai dasar pelaksanaan kerja sama antara BPP dengan Akademi Prestasi dan Koding Next. 2. Menindaklanjuti pembahasan teknis mengenai implementasi program, termasuk mekanisme pendanaan melalui RKAS dan Dana BOS sesuai ketentuan yang berlaku. 3. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk mengidentifikasi sekolah percontohan sebagai lokasi awal pelaksanaan program. 4. Mendorong pengembangan program pelatihan AI, coding, dan sertifikasi profesi secara bertahap sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas SDM di enam provinsi di Papua.	
2	Audiensi bersama Tokoh Adat Suku Besar Kabupaten Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah mengenai Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam dan Pemberdayaan Masyarakat Adat. 7 Juli 2026	Menerima dan membahas aspirasi serta usulan Tokoh Adat Suku Besar mengenai pengembangan potensi sumber daya alam dan pemberdayaan masyarakat adat, serta mengidentifikasi bentuk dukungan BPP sesuai tugas dan fungsinya dalam percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua.	1. Tokoh Adat Suku Besar Dedai Ihoada menyampaikan aspirasi serta proposal pengembangan potensi wilayah adat sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat. 2. BPP memperoleh gambaran mengenai potensi wilayah, kebutuhan, dan harapan masyarakat adat terhadap dukungan pemerintah dalam pengembangan wilayah. 3. BPP menjelaskan tugas dan fungsi kelembagaan dalam melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan di Papua. 4. Disepakati pentingnya koordinasi lanjutan dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait sesuai substansi usulan yang disampaikan.	1. Melakukan telaah terhadap proposal yang disampaikan Tokoh Adat sebagai bahan koordinasi dan evaluasi di lingkungan BPP. 2. Mengidentifikasi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan terhadap substansi usulan. 3. Memfasilitasi koordinasi lanjutan dengan pemangku kepentingan terkait untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat adat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Mengawal tindak lanjut usulan yang sejalan dengan kebijakan percepatan pembangunan dan pemberdayaan Orang Asli Papua melalui fungsi sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi BPP.	



3	Pertemuan bersama Pengusaha Perikanan Tuna terkait Kerja Sama Penyediaan Bahan Pangan bagi PT Pangansari Utama dan PT Freeport Indonesia. 7 Juli 2026	Melakukan koordinasi dengan pengusaha perikanan tuna Orang Asli Papua (OAP) dalam rangka menjajaki peluang kerja sama penyediaan bahan pangan bagi PT Pangansari Utama sebagai penyedia jasa katering PT Freeport Indonesia, serta mengidentifikasi kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan pasokan secara berkelanjutan.	1. Pertemuan belum menghasilkan kesepakatan atau nota kesepahaman (MoU) antara para pihak. 2. Pengusaha perikanan tuna menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi, khususnya terkait keterbatasan sarana dan prasarana penunjang usaha, kapasitas produksi, serta pemenuhan standar kebutuhan pasar untuk memasok bahan pangan kepada PT Pangansari Utama. 3. Para pihak sepakat untuk melanjutkan koordinasi guna mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan dalam mendukung kesiapan pengusaha perikanan tuna Orang Asli Papua.	1. Menginventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana pengusaha perikanan tuna OAP sebagai bahan rekomendasi kepada pemerintah dan pihak terkait. 2. Melakukan pemantauan tindak lanjut kerja sama sebagai bagian dari implementasi kebijakan afirmatif bagi pelaku usaha Orang Asli Papua.	
4	Koordinasi dan peninjauan kerja sama antara BPP dengan Bank BOSNIK terkait penguatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha Orang Asli Papua (OAP). 7 Juli 2026	Membangun sinergi antara BPP dan Bank BOSNIK dalam mendukung pemberdayaan ekonomi Orang Asli Papua melalui peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM dan jasa konstruksi, serta memperkenalkan peran BPP dalam percepatan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua.	1. BPP menyampaikan tugas dan fungsi kelembagaan dalam melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua. 2. Bank BOSNIK memaparkan profil kelembagaan serta perannya dalam penyaluran kredit kepada pelaku UMKM dan jasa konstruksi Orang Asli Papua. 3. Terbangun kesamaan pemahaman mengenai pentingnya perluasan akses pembiayaan sebagai upaya mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat OAP. 4. Bank BOSNIK menyampaikan harapan untuk membangun kerja sama dengan BPP dalam mendukung pengembangan pembiayaan bagi pelaku usaha Orang Asli Papua.	1. Menindaklanjuti hasil koordinasi melalui pembahasan lebih lanjut mengenai ruang lingkup dan bentuk kerja sama antara BPP dan Bank BOSNIK. 2. Mengidentifikasi program pembiayaan yang dapat mendukung pengembangan UMKM dan jasa konstruksi Orang Asli Papua. 3. Mendorong koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha OAP. 4. Menyusun rencana tindak lanjut sebagai dasar pengembangan kemitraan yang mendukung pemberdayaan ekonomi Orang Asli Papua secara berkelanjutan.	



5	Rapat Koordinasi Pembahasan Persiapan Pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). 10 Juli 2026	Melakukan koordinasi dan pembahasan penyelesaian persyaratan administrasi sebagai persiapan pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kabupaten Keerom.	Dalam pertemuan dibahas langkah-langkah penyelesaian persyaratan administrasi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Selain itu, telah dibentuk tim administrasi pada Koperasi Onomi Madani Papua yang bertugas melakukan pengelolaan dan pendataan petani serta lahan perkebunan sawit di Kabupaten Keerom sebagai bagian dari proses verifikasi dan pemenuhan persyaratan program.	Perlu dilakukan pendampingan dan koordinasi secara berkelanjutan antara BP3OKP, Dinas Pertanian Kabupaten Keerom, APKASINDO, dan Koperasi Onomi Madani Papua guna memastikan seluruh persyaratan administrasi, pendataan petani, dan verifikasi lahan dapat diselesaikan tepat waktu sehingga pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dapat berjalan sesuai ketentuan.	
6	Pertemuan Badan Pengarah Papua (BPP) bersama Mantan Bupati Kabupaten Jayapura terkait Pemetaan Wilayah Adat dan Penguatan Perlindungan Hak Orang Asli Papua (OAP). 13 Juli 2026	Melakukan koordinasi dan diskusi mengenai percepatan pemetaan wilayah adat, penguatan perlindungan hak Orang Asli Papua (OAP), serta peran Badan Pengarah Papua dalam mendorong implementasi kebijakan terkait pengakuan masyarakat hukum adat.	1. Dibahas pentingnya percepatan pemetaan wilayah adat sebagai dasar pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat. 2. Dibahas upaya penguatan perlindungan hak Orang Asli Papua (OAP) melalui pengakuan wilayah adat dan regulasi daerah. 3. Disampaikan peran Badan Pengarah Papua dalam mendorong sinkronisasi dan koordinasi percepatan pengakuan wilayah adat di Tanah Papua.	1. Melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk mendorong pembentukan Tim Pemetaan Wilayah Adat melalui Peraturan Daerah atau kebijakan daerah. 2. Mendorong identifikasi dan verifikasi wilayah adat prioritas sebagai dasar proses pengakuan masyarakat hukum adat. 3. Mengawal percepatan penerbitan Surat Keputusan (SK) pengakuan wilayah adat oleh Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sesuai kewenangannya.	



7	Pertemuan Lanjutan bersama Tokoh Adat Suku Besar Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Mamberamo Tengah terkait Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam dan Pemberdayaan Masyarakat Adat. 13 Juli 2026	Menindaklanjuti hasil audiensi sebelumnya antara Badan Pengarah Papua (BPP) dengan Tokoh Adat Suku Besar Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Mamberamo Tengah. Membahas potensi pengembangan sumber daya alam yang dapat dikelola secara berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama pembangunan. Mengidentifikasi kebutuhan dukungan pemerintah serta menyelaraskan aspirasi masyarakat adat dengan program percepatan pembangunan di wilayah Papua.	1. Tokoh adat menyampaikan potensi sumber daya alam di wilayah Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Mamberamo Tengah yang dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat. 2. Dilakukan pembahasan mengenai penguatan peran masyarakat adat dalam pengelolaan potensi sumber daya alam dengan tetap memperhatikan nilai-nilai adat, kelestarian lingkungan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Badan Pengarah Papua menerima aspirasi dan usulan dari tokoh adat sebagai bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah terkait.	1. Tokoh adat diminta melengkapi dokumen dan data pendukung terkait potensi wilayah serta usulan program yang akan diajukan sebagai bahan pembahasan lebih lanjut. 2. Badan Pengarah Papua akan melakukan tindak lanjut melalui fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) guna mendorong pengembangan potensi sumber daya alam yang berpihak pada pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat adat.	
8	Pembahasan Pemanfaatan Buangan Air Danau Sentani untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) bersama konsultan perencanaan pembangunan PLTA di Yokiwa, bersama Ondolo Yokiwa. 22 Juli 2026	Membahas potensi pemanfaatan buangan air Danau Sentani sebagai sumber energi terbarukan yang mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Papua.	1. Disepakati perlunya penyusunan dan pemutakhiran dokumen teknis, penyelesaian hak ulayat, serta pelibatan masyarakat adat sebagai bagian dari persiapan pembangunan PLTA. 2. Pokja Papua Produktif akan mengoordinasikan sinkronisasi program dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait.	Menindaklanjuti penyusunan business plan dan dokumen pendukung, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memfasilitasi penyelesaian hak ulayat dan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat adat guna mendukung implementasi pembangunan PLTA secara berkelanjutan.	



9	Mendampingi Anggota Badan Pengarah Papua Provinsi Papua sebagai narasumber pada Kegiatan Analisa dan Evaluasi Ipoleksosbudkamnegsus Direktorat Intelijen Keamanan (Ditintelkam) Polda Papua Tahun Anggaran 2026. 27 Juli 2026	Mendukung pelaksanaan tugas Anggota Badan Pengarah Papua sebagai narasumber serta memperkuat koordinasi dengan Direktorat Intelijen Keamanan (Ditintelkam) Polda Papua dalam mendukung stabilitas keamanan dan percepatan pembangunan di Tanah Papua.	Anggota Badan Pengarah Papua menyampaikan materi mengenai transformasi peran intelijen dalam mendukung pembangunan, implementasi Otonomi Khusus Papua, pengelolaan Dana Otonomi Khusus, serta sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas keamanan. Melalui diskusi, diperoleh masukan terkait penguatan koordinasi, optimalisasi pemanfaatan Dana Otonomi Khusus, serta pendekatan kolaboratif dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Orang Asli Papua.	Melakukan koordinasi lanjutan antara Badan Pengarah Papua, Ditintelkam Polda Papua, pemerintah daerah, dan kementerian/lembaga terkait untuk mendukung pelaksanaan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK), meningkatkan transparansi pengelolaan Dana Otonomi Khusus, serta memperkuat pemberdayaan masyarakat Orang Asli Papua dalam mendukung pembangunan yang aman, inklusif, dan berkelanjutan.	
---	--	--	---	---	---



10	Mendampingi Kelompok Nelayan terkait Zoom Seminar Nasional "Papua Damai Dimulai dari Ekonomi Masyarakat Adat: Membangun Ekonomi Budaya Papua melalui Penguatan Peran Klan/Marga sebagai Aktor Pembangunan". 29 Juli 2026	Memperkuat implementasi Otonomi Khusus Papua melalui pembangunan ekonomi berbasis budaya, mendorong sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat adat, serta memperkuat peran klan/marga sebagai aktor utama pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua.	Seminar menghasilkan kesepakatan bahwa pembangunan Papua harus menempatkan masyarakat adat sebagai subjek utama pembangunan melalui penguatan kelembagaan klan/marga, optimalisasi pengelolaan Dana Otonomi Khusus, pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal, hilirisasi komoditas unggulan, pemberdayaan UMKM Orang Asli Papua, penguatan ekonomi kreatif berbasis budaya, serta peningkatan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat adat dalam mendukung pembangunan Papua yang inklusif dan berkelanjutan.	1. Mengintegrasikan model pembangunan ekonomi berbasis klan/marga ke dalam perencanaan pembangunan daerah. 2. Memperkuat fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) BPP/BP3OKP dalam pelaksanaan program Otonomi Khusus Papua. 3. Mengoptimalkan pemanfaatan Dana Otonomi Khusus secara transparan, tepat sasaran, dan berorientasi pada kesejahteraan Orang Asli Papua. 4. Mengembangkan hilirisasi komoditas unggulan, koperasi masyarakat adat, UMKM, dan ekonomi kreatif berbasis budaya. 5. Memperkuat kemitraan lintas sektor antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat adat dalam percepatan pembangunan Papua.	
----	---	--	---	--	---



11	Dialog Strategis Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Bappenas bersama Gubernur dan Bupati/Wali Kota se-Tanah Papua melalui zoom. 30 Juli 2026	Menyelaraskan arah pembangunan Papua antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui integrasi dokumen perencanaan dengan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP), memperkuat implementasi Otonomi Khusus Papua, mengidentifikasi hambatan pembangunan, serta meningkatkan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan Papua.	Dialog menghasilkan komitmen bersama untuk menyelaraskan dokumen perencanaan daerah dengan RAPPP, memperkuat tata kelola dan optimalisasi Dana Otonomi Khusus, meningkatkan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah, memperkuat pelayanan dasar di bidang kesehatan dan pendidikan, membentuk Tim Asistensi lintas kementerian, serta meningkatkan koordinasi dan evaluasi pembangunan Papua secara berkala guna mendukung percepatan pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan.	1. Meningkatkan sinkronisasi dokumen perencanaan daerah dengan RAPPP dan sistem informasi pembangunan Papua. 2. Mengoptimalkan pemanfaatan Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur (DTI), DAK, dan sumber pendanaan lainnya secara efektif, transparan, dan tepat sasaran. 3. Mempercepat pembangunan infrastruktur strategis, peningkatan konektivitas, serta pemerataan pelayanan kesehatan dan pendidikan. 4. Memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan Tim Asistensi untuk mendukung percepatan pembangunan Papua.	 
----	--	---	--	---	---



**KESIMPULAN KESELURUHAN KEGIATAN KELOMPOK KERJA PAPUA PRODUKTIF BPP/BP3OKP
PROVINSI PAPUA PADA BULAN JULI 2026**

Sepanjang bulan Juli 2026, Kelompok Kerja Papua Produktif BPP/BP3OKP Provinsi Papua melaksanakan sebelas kegiatan strategis yang diarahkan pada pemberdayaan ekonomi Orang Asli Papua, penguatan kelembagaan masyarakat adat sebagai pelaku pembangunan, pengembangan potensi sumber daya alam dan energi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dengan uraian sebagai berikut:

1. Kejelasan hak ulayat dan kelembagaan masyarakat adat merupakan prasyarat bagi hampir seluruh agenda ekonomi.
Pertemuan mengenai percepatan pemetaan wilayah adat menegaskan bahwa pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat menjadi dasar bagi pengelolaan potensi wilayah. Kebutuhan yang sama muncul pada pembahasan rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air di Yokiwa, yang mensyaratkan penyelesaian hak ulayat dan pelibatan masyarakat adat, serta pada pembahasan pengembangan potensi sumber daya alam di Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Mamberamo Tengah. Percepatan pemetaan wilayah adat dan penerbitan keputusan pengakuan masyarakat hukum adat oleh kepala daerah sesuai kewenangannya karena itu menjadi kebutuhan mendesak.
2. Aspirasi masyarakat adat Mamberamo telah memasuki tahap pembahasan lanjutan.
Audiensi bersama Tokoh Adat Suku Besar Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Mamberamo Tengah dilanjutkan dengan pertemuan kedua yang membahas penguatan peran masyarakat adat dalam pengelolaan potensi sumber daya alam, dengan tetap memperhatikan nilai adat, kelestarian lingkungan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tokoh adat diminta melengkapi dokumen dan data pendukung sebagai bahan koordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
3. Kesiapan pelaku usaha Orang Asli Papua masih menjadi kendala dalam mengakses pasar besar.
Pertemuan bersama pengusaha perikanan tuna Orang Asli Papua terkait peluang penyediaan bahan pangan bagi penyedia jasa katering PT Freeport Indonesia belum menghasilkan kesepakatan. Kendala yang mengemuka adalah keterbatasan sarana dan prasarana penunjang usaha, kapasitas produksi, serta pemenuhan standar kebutuhan pasar. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan afirmatif memerlukan dukungan penguatan kapasitas usaha agar peluang pasar yang tersedia dapat benar-benar dimanfaatkan.
4. Perluasan akses pembiayaan bagi pelaku usaha Orang Asli Papua mulai dijangkau.
Koordinasi bersama Bank Bosnik menghasilkan kesamaan pemahaman mengenai pentingnya perluasan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah serta jasa konstruksi Orang Asli Papua, dan akan ditindaklanjuti melalui pembahasan ruang lingkup kerja sama.
5. Persiapan Program Peremajaan Sawit Rakyat di Kabupaten Keerom memasuki tahap pemenuhan persyaratan administrasi.
Telah dibentuk tim administrasi pada Koperasi Onomi Madani Papua yang bertugas melakukan pengelolaan dan pendataan petani serta lahan perkebunan sawit sebagai bagian dari proses verifikasi dan pemenuhan persyaratan program.
6. Penguatan kapasitas sumber daya manusia dijangkau melalui kemitraan pelatihan teknologi.
Konsultasi bersama Akademi Prestasi dan Koding Next menghasilkan kesepakatan mengenai potensi kerja sama pelatihan kecerdasan buatan, pemrograman, dan sertifikasi profesi bagi guru, peserta didik, aparatur, dan generasi muda Papua, dengan tindak lanjut berupa penyusunan nota kesepahaman dan penetapan sekolah percontohan.
7. Model pembangunan ekonomi berbasis klan/marga memperoleh penguatan konseptual dan dukungan lintas sektor.
Melalui pendampingan kelompok nelayan pada seminar nasional bertema penguatan peran klan/marga sebagai aktor pembangunan, dihasilkan kesepakatan bahwa masyarakat adat perlu ditempatkan sebagai subjek utama pembangunan melalui penguatan kelembagaan, hilirisasi komoditas unggulan, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya.
8. Keselarasan dokumen perencanaan daerah menjadi kerangka bagi seluruh agenda ekonomi.



Dialog Strategis bersama Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas menghasilkan komitmen penyelarasan dokumen perencanaan daerah dengan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua, penguatan tata kelola Dana Otonomi Khusus, serta pembentukan Tim Asistensi lintas kementerian.

Secara keseluruhan, kegiatan bulan Juli 2026 memperlihatkan satu benang merah: peluang ekonomi bagi Orang Asli Papua telah tersedia pada berbagai sektor — perikanan, perkebunan, energi, dan pengolahan hasil hutan — namun pemanfaatannya tertahan oleh dua hal yang saling berkaitan, yaitu belum tuntasnya pengakuan hukum atas wilayah adat sebagai dasar pengelolaan, dan belum memadainya kapasitas kelembagaan serta sarana usaha pelaku ekonomi Orang Asli Papua untuk memenuhi standar pasar. Penguatan pada kedua aspek tersebut menjadi kunci agar kebijakan afirmatif menghasilkan manfaat ekonomi yang nyata.

Hal-hal yang memerlukan perhatian dan arahan lebih lanjut:

1. Percepatan pemetaan wilayah adat dan penerbitan keputusan pengakuan masyarakat hukum adat oleh Gubernur serta Bupati/Wali Kota sesuai kewenangannya.
2. Dukungan penguatan sarana, prasarana, dan kapasitas produksi bagi pelaku usaha Orang Asli Papua agar mampu memenuhi standar pasokan pasar besar dan industri.
3. Perluasan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah serta jasa konstruksi Orang Asli Papua melalui kemitraan dengan lembaga keuangan.
4. Penyelesaian persyaratan administrasi, pendataan petani, dan verifikasi lahan Program Peremajaan Sawit Rakyat di Kabupaten Keerom.
5. Penyelesaian hak ulayat dan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat adat sebagai bagian dari persiapan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air di Yokiwa.
6. Tindak lanjut atas aspirasi dan proposal masyarakat adat Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Mamberamo Tengah melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang berwenang.

POKJA PAPUA CERDAS



JULI 2026

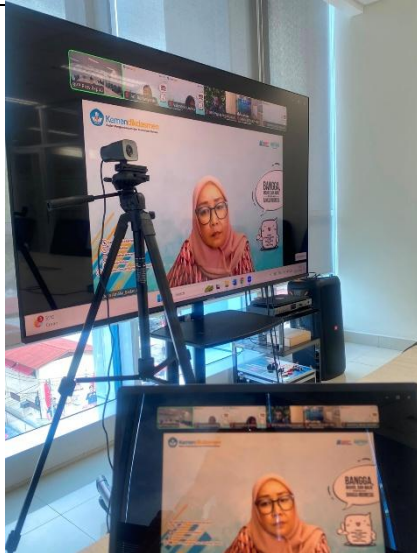
Badan Pengarah Papua
Perwakilan Provinsi Papua



**PELAKSANAAN KEGIATAN STRATEGIS
KELOMPOK KERJA CERDAS
BPP/BP3OKP PROVINSI PAPUA
PADA BULAN JULI 2026**

No	Kegiatan Strategis	Tujuan	Hasil	Rekomendasi	Dokumentasi
1	Rapat Pembahasan Program Kokurikuler Noken bersama Tim Pengembang (Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Papua) dan BP3OKP/BPP. 2 Juli 2026	Membahas perkembangan penyusunan Program Kokurikuler Noken sebagai upaya pelestarian budaya Papua melalui pendidikan serta mengidentifikasi dukungan BPP terhadap keberlanjutan program yang terkendala pendanaan.	1. BPP mengapresiasi pengembangan Program Kokurikuler Noken sebagai upaya pelestarian budaya Papua melalui pendidikan. 2. Tim Pengembang BGTK Provinsi Papua memaparkan perkembangan penyusunan perangkat pembelajaran, meliputi buku ajar, panduan pembelajaran, dan RPP, serta rencana pelatihan guru menggunakan model IN-OCT-IN2. 3. Teridentifikasi kebutuhan dukungan pendanaan untuk finalisasi buku ajar, pelaksanaan workshop, pelatihan guru, dan seminar diseminasi. 4. Program Kokurikuler Noken dinilai berpotensi menjadi model pembelajaran berbasis budaya lokal yang dapat diterapkan secara lebih luas pada satuan pendidikan di Papua. 5. BPP akan mengkaji peluang dukungan melalui fungsi sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi dengan kementerian/lembaga serta pemangku kepentingan terkait.	1. Mengidentifikasi alternatif sumber pendanaan bagi keberlanjutan Program Kokurikuler Noken. 2. Memfasilitasi finalisasi buku ajar, panduan pembelajaran, dan RPP bersama Tim Pengembang BGTK Provinsi Papua. 3. Mendukung pelaksanaan pelatihan guru menggunakan model IN-OCT-IN2. 4. Menyiapkan pelaksanaan seminar diseminasi setelah perangkat pembelajaran selesai disusun serta memperkuat koordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan terkait untuk mendukung implementasi Program Kokurikuler Noken secara berkelanjutan.	
2	Audiensi dan pemaparan profil serta program Yayasan Nusantara Sejati (YNS) kepada BPP. 3 Juli 2026	Yayasan Nusantara Sejati (YNS) memaparkan profil kelembagaan, pengalaman pelaksanaan program di bidang pendidikan, tata kelola, dan pembangunan wilayah, serta menjajaki peluang sinergi dan dukungan BPP dalam pengembangan program pemberdayaan masyarakat, khususnya di Papua.	1. YNS menyampaikan pengalaman pelaksanaan berbagai program peningkatan kapasitas guru, penguatan kepemimpinan sekolah, pengembangan pembelajaran holistik, serta pemberdayaan masyarakat di berbagai daerah Indonesia. 2. YNS memaparkan pendekatan pelaksanaan program yang berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan, tata kelola, dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. 3. BPP memperoleh gambaran mengenai kapasitas, rekam jejak, dan potensi kontribusi YNS sebagai mitra dalam mendukung program pembangunan sumber daya manusia di Papua. 4. Terbangun komunikasi awal untuk menjajaki kemungkinan kolaborasi pada program-	1. BPP melakukan kajian terhadap peluang kerja sama dengan YNS sesuai prioritas pembangunan Papua. 2. Mengidentifikasi program-program YNS yang dapat disinergikan dengan agenda pembangunan Papua, khususnya pada bidang pendidikan, penguatan kapasitas SDM, dan pemberdayaan masyarakat. 3. Melakukan koordinasi lanjutan dengan YNS dan pemangku kepentingan terkait apabila terdapat program yang memerlukan dukungan sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi oleh BPP.	



			program yang sejalan dengan tugas dan fungsi BPP.		
3	Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Kongres Bahasa Daerah 2026. 9 Juli 2026	Melakukan evaluasi terhadap perkembangan persiapan Kongres Bahasa Daerah (KBD) Tahun 2026, memastikan tindak lanjut koordinasi dengan pemerintah daerah, serta menyusun langkah strategis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan.	1. Tim Balai Bahasa menyampaikan perkembangan persiapan pelaksanaan Kongres Bahasa Daerah Tahun 2026, khususnya terkait koordinasi dengan pemerintah daerah di masing-masing wilayah. 2. Dilakukan konfirmasi mengenai status surat dan hasil koordinasi kepada kepala daerah untuk mengetahui apakah telah memperoleh persetujuan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. 3. Dibahas rencana tindak lanjut apabila proses persetujuan belum selesai, termasuk opsi penugasan tim dari Balai Bahasa Pusat untuk melakukan koordinasi secara langsung dengan para kepala daerah guna membahas dukungan dan kesiapan pelaksanaan Kongres Bahasa Daerah. 4. Disepakati bahwa akan dilaksanakan rapat koordinasi secara daring (Zoom Meeting) setiap minggu sebagai forum untuk menyampaikan perkembangan, berbagi informasi, mengevaluasi progres, serta menyelesaikan kendala yang dihadapi oleh masing-masing wilayah selama proses persiapan Kongres Bahasa Daerah Tahun 2026. 5. Seluruh peserta sepakat untuk terus memperkuat komunikasi dan koordinasi antarinstitusi agar seluruh tahapan persiapan dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.	1. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap tindak lanjut surat dan proses persetujuan dari pemerintah daerah. 2. Apabila diperlukan, Balai Bahasa Pusat agar melakukan koordinasi langsung dengan kepala daerah untuk mempercepat proses persetujuan dan memperoleh dukungan terhadap penyelenggaraan Kongres Bahasa Daerah Tahun 2026. 3. Melaksanakan rapat koordinasi mingguan secara konsisten untuk memantau perkembangan persiapan, mengidentifikasi hambatan, dan memastikan tindak lanjut yang telah disepakati dapat terlaksana tepat waktu. 4. Memperkuat sinergi antara BP3OKP, Balai Bahasa Provinsi Papua, dan pemerintah daerah guna memastikan seluruh persiapan Kongres Bahasa Daerah Tahun 2026 berjalan optimal dan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.	 



4	Mendampingi Pimpinan pada Rapat Pemantauan Progres Persiapan Peserta Intersip Periode Agustus 2026 & Arahan Kementerian Kesehatan RI 24 Juli 2026	Melaksanakan pemantauan terhadap progres persiapan pelaksanaan Program Internship Dokter dan Dokter Gigi Periode Agustus 2026 di Tanah Papua serta memperkuat koordinasi antara Kementerian Kesehatan, BP3OKP, dan pemerintah daerah guna memastikan kesiapan peserta, wahana internship, dan dukungan pelaksanaan program.	Disepakati percepatan penetapan wahana internship di Papua, penguatan koordinasi antara Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, dan BP3OKP, optimalisasi pendataan serta pendampingan peserta asal Papua, penyelesaian kendala teknis pada sistem pendaftaran, serta dukungan pembiayaan dan insentif guna mendukung pemerataan tenaga kesehatan di Tanah Papua.	Mendorong percepatan penetapan wahana internship di Papua, penguatan koordinasi antara Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, dan BP3OKP, optimalisasi pendataan dan pendampingan peserta asal Papua, penyelesaian kendala teknis sistem pendaftaran, serta memastikan dukungan pembiayaan dan insentif guna meningkatkan pemerataan tenaga kesehatan di Tanah Papua.	 
5	Sinergi BP3OKP dan Bank Indonesia dalam Mendukung dan Menyukkseskan Program Kokurikuler Noken sebagai Upaya Pelestarian Budaya dan Pemberdayaan Ekonomi Orang Asli Papua (OAP). 23 Juli 2026	Memperkuat sinergi antara BP3OKP, Bank Indonesia, dan para pemangku kepentingan dalam mendukung implementasi Program Kokurikuler Noken sebagai media pelestarian budaya, pendidikan berbasis kearifan lokal, serta pemberdayaan ekonomi Orang Asli Papua.	Disepakati kolaborasi antara BP3OKP dan Bank Indonesia untuk mendukung implementasi Program Kokurikuler Noken melalui penguatan literasi keuangan, digitalisasi, pengembangan UMKM pengrajin Noken, serta penyusunan rencana kerja bersama guna mendukung pelestarian budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.	Menyusun work plan dan roadmap pelaksanaan Program Kokurikuler Noken, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta mengoptimalkan dukungan Bank Indonesia melalui pelatihan, literasi keuangan, digitalisasi UMKM, dan pemberdayaan pengrajin Noken agar program dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi Orang Asli Papua.	 



6	Mendampingi Anggota Badan Pengarah Papua Provinsi Papua sebagai narasumber pada Kegiatan Analisa dan Evaluasi Ipoleksosbudkamnegsus Direktorat Intelijen Keamanan (Ditintelkam) Polda Papua Tahun Anggaran 2026. 27 Juli 2026	Mendukung pelaksanaan tugas Anggota Badan Pengarah Papua sebagai narasumber serta memperkuat koordinasi dengan Direktorat Intelijen Keamanan (Ditintelkam) Polda Papua dalam mendukung stabilitas keamanan dan percepatan pembangunan di Tanah Papua.	Anggota Badan Pengarah Papua menyampaikan materi mengenai transformasi peran intelijen dalam mendukung pembangunan, implementasi Otonomi Khusus Papua, pengelolaan Dana Otonomi Khusus, serta sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas keamanan. Melalui diskusi, diperoleh masukan terkait penguatan koordinasi, optimalisasi pemanfaatan Dana Otonomi Khusus, serta pendekatan kolaboratif dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Orang Asli Papua.	Melakukan koordinasi lanjutan antara Badan Pengarah Papua, Ditintelkam Polda Papua, pemerintah daerah, dan kementerian/lembaga terkait untuk mendukung pelaksanaan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK), meningkatkan transparansi pengelolaan Dana Otonomi Khusus, serta memperkuat pemberdayaan masyarakat Orang Asli Papua dalam mendukung pembangunan yang aman, inklusif, dan berkelanjutan.	
7	Audiensi bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura terkait Pengawasan dan Pendampingan Program Pendidikan. 27 Juli 2026	Membahas tata kelola Dana Otonomi Khusus bidang pendidikan, peningkatan kesejahteraan guru honorer, serta validasi data yayasan pelopor sebagai dasar penyusunan kebijakan dan penganggaran pendidikan di Kabupaten Jayapura.	Diperoleh kesepahaman bahwa permasalahan utama sektor pendidikan di Kabupaten Jayapura terletak pada tata kelola dan validitas data, bukan pada keterbatasan anggaran. Disepakati pentingnya validasi data sekolah, guru, dan sarana prasarana, optimalisasi pemanfaatan Dana Otsus sesuai ketentuan, penguatan dukungan terhadap lima yayasan pelopor pendidikan, serta peningkatan pengawasan terhadap lembaga pendidikan yang tidak memenuhi standar.	Melakukan validasi dan pemutakhiran data pendidikan secara menyeluruh, memperkuat tata kelola Dana Otsus bidang pendidikan sesuai regulasi, meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan yayasan pelopor dalam penyusunan kebutuhan anggaran, serta memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan guna meningkatkan mutu layanan pendidikan bagi masyarakat Papua.	



8	Mendampingi Kelompok Tani Huruwakha pada Zoom terkait Peningkatan Ekonomi Berbasis Klan/Marga. Kelompok Tani Huruwakha merupakan kelompok usaha masyarakat adat yang memproduksi tepung sagu dari Dusun Klan Huruwakha 29 Juli 2026	Melakukan koordinasi dan inventarisasi potensi ekonomi berbasis klan/marga melalui pengembangan usaha pengolahan tepung sagu sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat serta mendorong penguatan ekonomi budaya Papua.	Kelompok Tani Huruwakha menyampaikan bahwa usaha pengolahan tepung sagu memanfaatkan sumber daya alam yang berada di wilayah adat (dusun klan) sebagai basis kegiatan ekonomi masyarakat. Kelompok juga menyampaikan kebutuhan dukungan dalam aspek penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas produksi, pemasaran, serta akses terhadap kemitraan dan pembiayaan guna meningkatkan nilai tambah produk sagu.	1. Mendorong penguatan kelembagaan usaha berbasis klan/marga sebagai model pemberdayaan ekonomi masyarakat adat. 2. Memfasilitasi koordinasi dengan pemerintah daerah, kementerian/lembaga, dan mitra usaha untuk mendukung pengembangan produksi, pengolahan, dan pemasaran tepung sagu. 3. Mendorong pengembangan hilirisasi komoditas sagu sebagai produk unggulan berbasis potensi lokal dan ekonomi budaya Papua. 4. Menjadikan Kelompok Tani Huruwakha sebagai salah satu contoh praktik baik (best practice) pengembangan ekonomi berbasis klan/marga dalam mendukung implementasi Otonomi Khusus Papua.	
9	Dialog Strategis Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Bappenas bersama Gubernur dan Bupati/Wali Kota se-Tanah Papua melalui zoom. 30 Juli 2026	Menyelaraskan arah pembangunan Papua antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui integrasi dokumen perencanaan dengan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP), memperkuat implementasi Otonomi Khusus Papua, mengidentifikasi hambatan pembangunan, serta meningkatkan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan Papua.	Dialog menghasilkan komitmen bersama untuk menyelaraskan dokumen perencanaan daerah dengan RAPPP, memperkuat tata kelola dan optimalisasi Dana Otonomi Khusus, meningkatkan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah, memperkuat pelayanan dasar di bidang kesehatan dan pendidikan, membentuk Tim Asistensi lintas kementerian, serta meningkatkan koordinasi dan evaluasi pembangunan Papua secara berkala guna mendukung percepatan pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan.	1. Meningkatkan sinkronisasi dokumen perencanaan daerah dengan RAPPP dan sistem informasi pembangunan Papua. 2. Mengoptimalkan pemanfaatan Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur (DTI), DAK, dan sumber pendanaan lainnya secara efektif, transparan, dan tepat sasaran. 3. Mempercepat pembangunan infrastruktur strategis, peningkatan konektivitas, serta pemerataan pelayanan kesehatan dan pendidikan. 4. Memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan Tim Asistensi untuk mendukung percepatan pembangunan Papua. 5. Menyusun rekomendasi strategis sebagai bahan pembahasan dalam Rapat Badan Pengarah Papua yang dipimpin Wakil Presiden RI serta melaksanakan evaluasi pembangunan Papua secara berkala.	



10	Rapat Pembahasan Buku Model Pembelajaran Mendalam Berbasis Kearifan Lokal Papua 31 Juli 2026	Menyusun Buku Model Pembelajaran Mendalam (KOKURIKULER) untuk bisa digunakan pada satuan pendidikan mulai dari TK/PAUD hingga SMA/SMK	1. Draf Buku sedang dipersiapkan Tim Penyusun (termasuk BP3OKP Provinsi Papua : Pokja Papua Cerdas) dengan tenggang waktu sebelum peluncuran pada tanggal 25 Agustus 2026. 2. BP3OKP memberikan Inputan secara menyeluruh namun juga pada Bagian Filosofi-Dasar Hukum dan Keberlanjutan Pembelajaran mendalam ini dalam hal peran pemerintah daerah.	1. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Papua (Gubernur Papua) untuk hadir dalam agenda peluncuran buku dan mempersiapkan keberlanjutan program ini. 2. Rapat Internal POKJA untuk membahas penyusunan buku ini	
----	---	--	--	---	---



**KESIMPULAN KESELURUHAN KEGIATAN KELOMPOK KERJA CERDAS BPP/BP3OKP
PROVINSI PAPUA PADA BULAN JULI 2026**

Sepanjang bulan Juli 2026, Kelompok Kerja Papua Cerdas BPP/BP3OKP Provinsi Papua melaksanakan sepuluh kegiatan strategis yang diarahkan pada penguatan mutu pendidikan, pelestarian bahasa dan budaya Papua melalui jalur pendidikan, penguatan ekonomi budaya berbasis klan/marga, serta perbaikan tata kelola pembiayaan pendidikan yang bersumber dari penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pengembangan pendidikan berbasis kearifan lokal Papua menunjukkan kemajuan yang nyata. Program Kokurikuler Noken bersama Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Papua telah memasuki tahap penyusunan perangkat pembelajaran berupa buku ajar, panduan pembelajaran, dan rencana pelaksanaan pembelajaran, disertai rencana pelatihan guru dengan model IN–OCT–IN2. Sejalan dengan itu, penyusunan Buku Model Pembelajaran Mendalam Berbasis Kearifan Lokal Papua bagi satuan pendidikan jenjang PAUD/TK hingga SMA/SMK telah memasuki tahap penyelesaian draf, dengan peluncuran dijadwalkan pada 25 Agustus 2026. Kedua program berpotensi menjadi model pembelajaran berbasis budaya lokal yang dapat diterapkan secara lebih luas pada satuan pendidikan di Papua.
2. Keberlanjutan program pendidikan berbasis kearifan lokal masih terkendala pendanaan. Teridentifikasi kebutuhan dukungan pembiayaan untuk finalisasi buku ajar, penyelenggaraan lokakarya, pelatihan guru, dan seminar diseminasi. Sebagai langkah awal, telah terjalin sinergi antara BP3OKP dan Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Papua yang mencakup penguatan literasi keuangan, digitalisasi, dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah pengrajin Noken, sehingga pelestarian budaya berjalan seiring dengan pemberdayaan ekonomi Orang Asli Papua.
3. Penguatan ekonomi budaya berbasis klan/marga mulai menemukan bentuk yang dapat direplikasi.
Pendampingan terhadap Kelompok Tani Huruwakha, kelompok usaha masyarakat adat yang memproduksi tepung sagu dari dusun klan, memperlihatkan model pemanfaatan sumber daya alam wilayah adat sebagai basis kegiatan ekonomi masyarakat. Kelompok menyampaikan kebutuhan dukungan pada aspek penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas produksi, pemasaran, serta akses kemitraan dan pembiayaan. Model ini berpotensi dijadikan contoh praktik baik pengembangan ekonomi berbasis klan/marga dalam mendukung implementasi Otonomi Khusus Papua.
4. Permasalahan pokok sektor pendidikan terletak pada tata kelola dan validitas data, bukan pada keterbatasan anggaran.
Audiensi bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura menghasilkan kesepahaman mengenai pentingnya validasi data sekolah, guru, dan sarana prasarana sebagai dasar penyusunan kebijakan dan penganggaran, optimalisasi pemanfaatan Dana Otonomi Khusus sesuai ketentuan, penguatan dukungan terhadap yayasan pelopor pendidikan, serta peningkatan pengawasan terhadap lembaga pendidikan yang belum memenuhi standar.
5. Keselarasan dokumen perencanaan daerah menjadi kunci ketepatan sasaran pemanfaatan Dana Otonomi Khusus.
Dialog Strategis bersama Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas menghasilkan komitmen penyelarasan dokumen perencanaan daerah dengan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua, penguatan tata kelola Dana Otonomi Khusus, serta pembentukan Tim Asistensi lintas kementerian sebagai kerangka bagi seluruh program sektoral, termasuk pendidikan.
6. Persiapan pelestarian bahasa daerah berjalan, dengan kendala pada proses persetujuan daerah.
Persiapan penyelenggaraan Kongres Bahasa Daerah Tahun 2026 dipantau melalui rapat koordinasi berkala secara daring. Kendala utama yang teridentifikasi adalah belum selesainya proses persetujuan sebagian kepala daerah yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan di wilayah masing-masing.
7. Dukungan lintas sektor dan kemitraan terus diperluas.
Melalui pemantauan persiapan peserta internsip dokter dan dokter gigi periode Agustus 2026, penajakan kemitraan dengan lembaga nonpemerintah, serta pendampingan Anggota Badan Pengarah Papua sebagai narasumber pada forum Direktorat Intelijen Keamanan Polda Papua, Kelompok Kerja memperkuat pelaksanaan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi bersama kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan mitra pembangunan.



Secara keseluruhan, kegiatan bulan Juli 2026 memperlihatkan bahwa peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua melalui jalur pendidikan dan kebudayaan bertumpu pada empat hal yang saling terkait: validitas data sebagai dasar perencanaan, ketertiban tata kelola pembiayaan Otonomi Khusus, kepastian pendanaan bagi program pendidikan berbasis kearifan lokal yang telah menunjukkan hasil nyata, serta penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat adat agar kekayaan budaya Papua memberi manfaat ekonomi langsung bagi pemiliknya.

Hal-hal yang memerlukan perhatian dan arahan lebih lanjut:

1. Kepastian dukungan pendanaan bagi keberlanjutan Program Kokurikuler Noken dan Buku Model Pembelajaran Mendalam Berbasis Kearifan Lokal Papua, meliputi finalisasi perangkat pembelajaran, pelatihan guru, dan diseminasi.
2. Dukungan kehadiran Pemerintah Provinsi Papua pada peluncuran Buku Model Pembelajaran Mendalam pada 25 Agustus 2026, sekaligus komitmen keberlanjutan penerapannya pada satuan pendidikan.
3. Percepatan validasi dan pemutakhiran data pendidikan sebagai dasar perencanaan dan penganggaran Dana Otonomi Khusus bidang pendidikan.
4. Percepatan persetujuan kepala daerah bagi penyelenggaraan Kongres Bahasa Daerah Tahun 2026.
5. Percepatan penetapan wahana internsip serta kepastian pembiayaan dan insentif bagi tenaga kesehatan di Tanah Papua.
6. Dukungan penguatan kelembagaan, permodalan, dan pemasaran bagi kelompok usaha masyarakat adat berbasis klan/marga sebagai model pemberdayaan ekonomi Orang Asli Papua.

POKJA PAPUA SEHAT



BPP

BADAN PENGARAH PAPUA

JULI 2026

Badan Pengarah Papua

Perwakilan Provinsi Papua



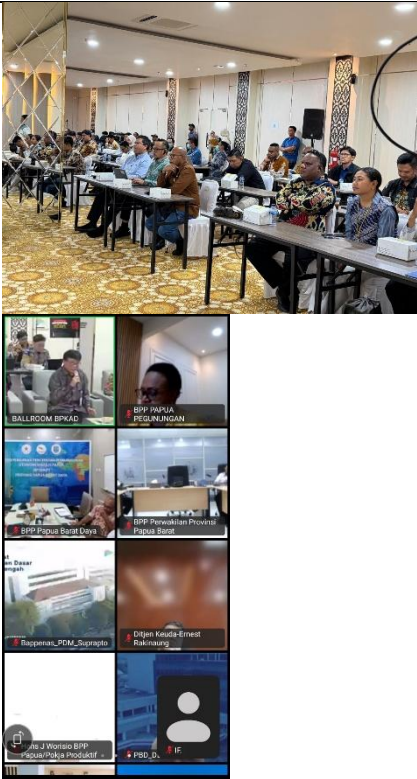
**PELAKSANAAN KEGIATAN STRATEGIS
KELOMPOK KERJA PAPUA SEHAT
BPP/BP3OKP PROVINSI PAPUA
PADA BULAN JULI 2026**

No	Kegiatan Strategis	Tujuan	Hasil	Rekomendasi	Dokumentasi
1	Forum Komunikasi dengan Pemangku Kepentingan Utama Provinsi Papua terkait Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 22 Juli 2026	Memastikan pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Provinsi Papua selaras dengan kebijakan Otonomi Khusus Papua serta memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan dalam meningkatkan kepesertaan, kualitas layanan, dan tata kelola pembiayaan JKN.	Diperoleh gambaran kondisi pelaksanaan JKN di Provinsi Papua, termasuk cakupan kepesertaan, kualitas layanan, kendala pembiayaan, dan penguatan sinergi antara BPJS Kesehatan, Pemerintah Provinsi Papua, dan BP3OKP. Disepakati langkah strategis berupa penguatan kepesertaan aktif, percepatan pembayaran iuran, peningkatan fasilitas kesehatan, digitalisasi layanan, serta penyusunan rencana aksi dan mekanisme koordinasi lanjutan.	1. Mengoptimalkan pendataan dan kepesertaan JKN, khususnya bagi Orang Asli Papua (OAP), melalui integrasi data kependudukan dan penguatan Program PESIAR. 2. Memperkuat pembiayaan JKN melalui skema sharing iuran serta menjamin ketepatan pembayaran iuran oleh pemerintah daerah. 3. Meningkatkan kapasitas fasilitas dan tenaga kesehatan, terutama di wilayah terpencil, serta mempercepat digitalisasi layanan dan sistem klaim. 4. Mengintegrasikan program JKN dengan prioritas pembangunan kesehatan daerah dan memperkuat pemanfaatan Dana Otonomi Khusus untuk mendukung akses layanan kesehatan bagi OAP.	
2	Rapat Pemantauan Progres Persiapan Peserta Intersip Periode Agustus 2026 & Arahan Kementerian Kesehatan RI. 24 Juli 2026	Melaksanakan koordinasi antara BP3OKP dan Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Papua dalam rangka membangun sinergi untuk mendukung implementasi Program Kokurikuler Noken sebagai upaya pelestarian budaya Papua sekaligus pemberdayaan ekonomi Orang Asli Papua (OAP).	Disepakati kolaborasi antara BP3OKP dan Bank Indonesia dalam mendukung implementasi Program Kokurikuler Noken melalui penguatan pelestarian budaya, pendidikan, literasi keuangan, digitalisasi, dan pemberdayaan UMKM pengrajin Noken. Para pihak juga berkomitmen menyusun rencana kerja bersama serta melakukan koordinasi lintas sektor guna memastikan pelaksanaan program berjalan efektif dan berkelanjutan.	Mendorong percepatan penetapan wahana internship di Papua, penguatan koordinasi antara Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, dan BP3OKP, optimalisasi pendataan dan pendampingan peserta asal Papua, penyelesaian kendala teknis sistem pendaftaran, serta memastikan dukungan pembiayaan dan insentif guna meningkatkan pemerataan tenaga kesehatan di Tanah Papua.	 



3	Menjadi Narasumber Kegiatan Analisa dan Evaluasi Ipoleksosbudkamnegsus T.A.2026. 27 Juli 2026	Menjadi Narasumber pada Kegiatan Analisa dan Evaluasi Ipoleksosbudkamnegsus Direktorat Intelijen Keamanan (Ditintelkam) Polda Papua Tahun Anggaran 2026.	Menyampaikan materi mengenai transformasi peran intelijen dalam mendukung percepatan pembangunan di Papua serta memperkuat sinergi antara Badan Pengarah Papua (BPP), Kepolisian, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas keamanan dan mendukung implementasi Otonomi Khusus Papua.	Memperkuat koordinasi antara BPP, Polri, pemerintah daerah, dan kementerian/lembaga dalam pelaksanaan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK), meningkatkan transparansi pengelolaan Dana Otonomi Khusus, mengoptimalkan pemberdayaan ekonomi masyarakat Orang Asli Papua, serta mendukung penyelesaian isu-isu strategis melalui pendekatan keamanan, pembangunan, dan kesejahteraan secara terpadu.	
4	Mendampingi Anggota BPP pada kegiatan Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 29 Juli 2026	1. Mendampingi Anggota BPP dalam penyampaian materi mengenai pembangunan ekonomi budaya Papua berbasis masyarakat adat kepada civitas akademika. 2. Memperkuat sinergi antara Badan Pengarah Papua, perguruan tinggi, mahasiswa, dan pemangku kepentingan dalam mendukung percepatan pembangunan Papua.	1. Anggota BPP menyampaikan materi mengenai konsep Ekonomi Budaya Papua, penguatan peran klan/marga sebagai aktor pembangunan, serta pemberdayaan Orang Asli Papua melalui pendekatan berbasis budaya. 2. Terjalin diskusi dan pertukaran gagasan antara narasumber dan peserta mengenai penguatan kelembagaan masyarakat adat, kemitraan pembangunan, dan implementasi Otonomi Khusus Papua.	1. Memperkuat kerja sama antara Badan Pengarah Papua dengan perguruan tinggi dalam pengembangan kajian dan program pembangunan Papua. 2. Mendorong pelibatan mahasiswa sebagai mitra dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi budaya Papua. Mengembangkan tindak lanjut berupa kolaborasi program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua.	



5	Dialog Strategis Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Bappenas bersama Gubernur dan Bupati/Wali Kota se-Tanah Papua melalui Zoom. 30 Juli 2026	Menyelaraskan arah pembangunan Papua antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui integrasi dokumen perencanaan dengan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP), memperkuat implementasi Otonomi Khusus Papua, mengidentifikasi hambatan pembangunan, serta meningkatkan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan Papua.	Dialog menghasilkan komitmen bersama untuk menyelaraskan dokumen perencanaan daerah dengan RAPPP, memperkuat tata kelola dan optimalisasi Dana Otonomi Khusus, meningkatkan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah, memperkuat pelayanan dasar di bidang kesehatan dan pendidikan, membentuk Tim Asistensi lintas kementerian, serta meningkatkan koordinasi dan evaluasi pembangunan Papua secara berkala guna mendukung percepatan pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan.	1. Meningkatkan sinkronisasi dokumen perencanaan daerah dengan RAPPP dan sistem informasi pembangunan Papua. 2. Mengoptimalkan pemanfaatan Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur (DTI), DAK, dan sumber pendanaan lainnya secara efektif, transparan, dan tepat sasaran. 3. Mempercepat pembangunan infrastruktur strategis, peningkatan konektivitas, serta pemerataan pelayanan kesehatan dan pendidikan. 4. Memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan Tim Asistensi untuk mendukung percepatan pembangunan Papua. 5. Menyusun rekomendasi strategis sebagai bahan pembahasan dalam Rapat Badan Pengarah Papua yang dipimpin Wakil Presiden RI serta melaksanakan evaluasi pembangunan Papua secara berkala.	
---	--	---	--	--	--



**KESIMPULAN KESELURUHAN KEGIATAN KELOMPOK KERJA PAPUASEHAT BPP/BP3OKP
PROVINSI PAPUA PADA BULAN JULI 2026**

Sepanjang bulan Juli 2026, Kelompok Kerja Sehat BPP/BP3OKP Provinsi Papua melaksanakan rangkaian kegiatan strategis yang secara keseluruhan diarahkan pada penguatan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) dalam percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua, dengan penekanan pada sektor kesehatan sebagai pelayanan dasar bagi Orang Asli Papua.

Pertama, di bidang jaminan dan pelayanan kesehatan. Forum komunikasi dengan pemangku kepentingan utama menunjukkan bahwa peningkatan cakupan Jaminan Kesehatan Nasional bagi Orang Asli Papua masih menghadapi tiga kendala yang saling berkaitan: validitas data kependudukan, ketepatan pembayaran iuran oleh pemerintah daerah, dan keterbatasan fasilitas serta tenaga kesehatan di wilayah terpencil. Ketiganya tidak dapat diselesaikan secara terpisah, sehingga diperlukan penanganan terpadu yang menghubungkan pendataan, pembiayaan, dan penyediaan layanan dalam satu rencana aksi.

Kedua, di bidang pemerataan tenaga kesehatan. Pemantauan persiapan peserta internship periode Agustus 2026 menegaskan pentingnya percepatan penetapan wahana internship di Tanah Papua, disertai kepastian dukungan pembiayaan dan insentif. Tanpa kepastian tersebut, upaya pemerataan tenaga kesehatan di daerah terpencil akan sulit dipertahankan secara berkelanjutan.

Ketiga, di bidang perencanaan dan pembiayaan. Dialog strategis bersama Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas menghasilkan komitmen penyelarasan dokumen perencanaan daerah dengan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua, penguatan tata kelola Dana Otonomi Khusus, serta pembentukan Tim Asistensi lintas kementerian. Komitmen ini menjadi kerangka bagi seluruh program sektoral, termasuk kesehatan, agar terhubung dengan sumber pembiayaan yang tersedia.

Keempat, di bidang penguatan kemitraan. Melalui peran sebagai narasumber pada forum akademik dan forum keamanan, Badan Pengarah Papua memperluas pemahaman para pemangku kepentingan mengenai pendekatan pembangunan Papua yang menempatkan Orang Asli Papua sebagai pelaku utama, sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung stabilitas dan keberlanjutan pembangunan.

Secara keseluruhan, kegiatan bulan Juli 2026 memperlihatkan bahwa persoalan pelayanan kesehatan di Papua bersifat lintas sektor dan tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi. Kualitas data kependudukan, ketertiban pembiayaan daerah, ketersediaan tenaga kesehatan, dan keselarasan dokumen perencanaan merupakan satu rangkaian yang saling menentukan.

Hal-hal yang memerlukan perhatian dan arahan lebih lanjut:

1. Percepatan integrasi data kependudukan Orang Asli Papua sebagai dasar kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dan program Otonomi Khusus lainnya.
2. Penegasan kewajiban pemerintah daerah atas ketepatan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional.
3. Percepatan penetapan wahana internship serta kepastian dukungan pembiayaan dan insentif bagi tenaga kesehatan di Tanah Papua.
4. Optimalisasi pemanfaatan Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur untuk penguatan fasilitas kesehatan di wilayah terpencil.
5. Penguatan peran Tim Asistensi lintas kementerian dalam mengawal keselarasan dokumen perencanaan daerah dengan RAPPP.



JULI 2026



KESIMPULAN KESELURUHAN KEGIATAN :

Sepanjang bulan Juli 2026, Badan Pengarah Papua Perwakilan Provinsi Papua melalui empat Kelompok Kerja — Papua Cerdas, Papua Sehat, Papua Produktif, dan Papua Politik, Hukum, dan Keamanan — melaksanakan rangkaian kegiatan strategis dalam rangka pelaksanaan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi guna mendukung percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua. Dari keseluruhan kegiatan tersebut, dapat dirumuskan lima kesimpulan utama sebagai berikut:

1. Validitas data merupakan hambatan yang berulang pada seluruh sektor, dan menjadi persoalan paling mendasar.

Temuan yang sama muncul pada keempat kelompok kerja dengan wujud yang berbeda-beda. Pada bidang pendidikan, permasalahan pokok sektor pendidikan di Kabupaten Jayapura terletak pada tata kelola dan validitas data sekolah, guru, dan sarana prasarana, bukan pada keterbatasan anggaran. Pada bidang kesehatan, peningkatan cakupan Jaminan Kesehatan Nasional bagi Orang Asli Papua terkendala validitas data kependudukan. Pada bidang ekonomi, pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat di Kabupaten Keerom masih menunggu penyelesaian pendataan petani dan verifikasi lahan. Pada bidang pengawasan, data mengenai perusahaan pelaksana dan keterlibatan tenaga kerja Orang Asli Papua pada pembangunan Sekolah Rakyat belum dapat disampaikan.

Dengan demikian, perbaikan basis data kependudukan dan data sektoral merupakan prasyarat bagi ketepatan sasaran seluruh program Otonomi Khusus, dan sepatutnya diperlakukan sebagai agenda prioritas lintas sektor.

2. Keberpihakan kepada Orang Asli Papua pada proyek strategis pemerintah belum dapat dipastikan pelaksanaannya secara terukur.

Koordinasi bersama Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Papua mengenai pelibatan pengusaha Orang Asli Papua pada pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Sarmi, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Biak Numfor telah dilakukan dua kali, namun data pelaksana pekerjaan dan bentuk keterlibatan Orang Asli Papua belum tersedia. Pada saat yang sama, pertemuan bersama pengusaha perikanan tuna Orang Asli Papua terkait peluang penyediaan bahan pangan bagi penyedia jasa catering PT Freeport Indonesia belum menghasilkan kesepakatan karena keterbatasan sarana, kapasitas produksi, dan pemenuhan standar pasar.

Kedua temuan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan afirmatif memerlukan dua hal sekaligus: **ketersediaan data untuk pengawasan**, dan **penguatan kapasitas usaha** agar peluang yang tersedia dapat benar-benar dimanfaatkan.

3. Pengakuan hukum atas wilayah adat menjadi prasyarat bagi pemanfaatan potensi ekonomi Papua.



Kebutuhan ini muncul secara konsisten pada pembahasan percepatan pemetaan wilayah adat, rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air di Yokiwa yang mensyaratkan penyelesaian hak ulayat, serta pengembangan potensi sumber daya alam di Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Mamberamo Tengah. Percepatan pemetaan wilayah adat dan penerbitan keputusan pengakuan masyarakat hukum adat oleh kepala daerah sesuai kewenangannya karena itu menjadi kebutuhan mendesak.

4. Model pembangunan berbasis klan/marga mulai menemukan bentuk yang dapat direplikasi.

Melalui pendampingan Kelompok Tani Huruwakha yang mengolah tepung sagu dari dusun klan, serta seminar nasional bertema penguatan peran klan/marga sebagai aktor pembangunan, dihasilkan kesepakatan bahwa masyarakat adat perlu ditempatkan sebagai subjek utama pembangunan melalui penguatan kelembagaan, hilirisasi komoditas unggulan, dan pengembangan ekonomi berbasis budaya. Sejalan dengan itu, Program Kokurikuler Noken dan penyusunan Buku Model Pembelajaran Mendalam Berbasis Kearifan Lokal Papua memperlihatkan bahwa pendekatan berbasis budaya juga dapat diterapkan pada jalur pendidikan. Namun keberlanjutan program-program tersebut masih terkendala kepastian pendanaan.

5. Pemerataan layanan dasar di wilayah terpencil masih memerlukan dukungan pusat.

Pemantauan persiapan peserta internsip dokter dan dokter gigi periode Agustus 2026 menegaskan pentingnya percepatan penetapan wahana internsip di Tanah Papua disertai kepastian pembiayaan dan insentif. Hal ini berkaitan langsung dengan keterbatasan fasilitas dan tenaga kesehatan di wilayah terpencil yang teridentifikasi pada forum Jaminan Kesehatan Nasional.

Kerangka penyelesaian. Dialog Strategis bersama Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas menghasilkan komitmen penyelarasan dokumen perencanaan daerah dengan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua, penguatan tata kelola Dana Otonomi Khusus, serta pembentukan Tim Asistensi lintas kementerian. Komitmen ini menjadi kerangka bagi penyelesaian seluruh persoalan di atas, sepanjang dapat dikawal hingga tingkat pelaksanaan.

Secara keseluruhan, kegiatan bulan Juli 2026 memperlihatkan bahwa persoalan pembangunan Papua tidak terletak pada ketiadaan program maupun ketersediaan anggaran, melainkan pada tiga hal yang saling mengunci: belum tuntasnya data penerima manfaat, belum jelasnya pengakuan hukum atas wilayah adat, dan belum memadainya kapasitas kelembagaan pelaku ekonomi maupun penyelenggara layanan dasar. Ketiganya bersifat lintas sektor dan tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi, sehingga memerlukan penanganan terpadu antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Badan Pengarah Papua.



Hal-hal yang memerlukan perhatian dan arahan lebih lanjut:

1. Percepatan pemutakhiran dan integrasi data Orang Asli Papua sebagai dasar tunggal bagi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi seluruh program Otonomi Khusus, mencakup data kependudukan, pendidikan, kesehatan, dan penerima manfaat program ekonomi.
2. Penyampaian data perusahaan pelaksana, mekanisme pengadaan, serta keterlibatan pelaku usaha dan tenaga kerja Orang Asli Papua pada pembangunan Sekolah Rakyat, sekaligus penegasan mekanisme pelibatan pengusaha Orang Asli Papua pada proyek strategis pemerintah di Tanah Papua.
3. Percepatan pemetaan wilayah adat dan penerbitan keputusan pengakuan masyarakat hukum adat oleh Gubernur serta Bupati/Wali Kota sesuai kewenangannya.
4. Kepastian dukungan pendanaan bagi keberlanjutan program pendidikan berbasis kearifan lokal, meliputi Program Kokurikuler Noken dan Buku Model Pembelajaran Mendalam Berbasis Kearifan Lokal Papua yang akan diluncurkan pada 25 Agustus 2026.
5. Percepatan penetapan wahana internsip serta kepastian pembiayaan dan insentif bagi tenaga kesehatan di Tanah Papua, disertai penegasan kewajiban pemerintah daerah atas ketepatan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional.
6. Dukungan penguatan sarana, kapasitas produksi, dan akses pembiayaan bagi pelaku usaha Orang Asli Papua agar mampu memenuhi standar pasar dan industri.
7. Penguatan peran Tim Asistensi lintas kementerian dalam mengawal keselarasan dokumen perencanaan daerah dengan RIPP dan RAPP.

Hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan di atas disampaikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam Rapat Badan Pengarah Papua yang dipimpin Wakil Presiden Republik Indonesia.



JULI 2026



PENUTUP

Demikian Laporan Bulanan Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Anggota Badan Pengarah dan Kelompok Kerja (Pokja) Badan Pengarah Papua (BPP) Provinsi Papua periode Juli 2026 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, sekaligus sebagai bahan informasi, evaluasi, dan koordinasi dalam mendukung percepatan pembangunan di Tanah Papua.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Sekretariat Badan Pengarah Papua pada Sekretariat Wakil Presiden serta para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan, menetapkan langkah tindak lanjut, dan memperkuat sinergi lintas sektor terhadap berbagai isu strategis, khususnya di bidang ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi Orang Asli Papua, penyelesaian permasalahan pertanahan, serta penguatan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua.

Badan Pengarah Papua (BPP) akan terus menjalankan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) melalui penguatan kolaborasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat adat guna memastikan setiap rekomendasi dan program prioritas dapat ditindaklanjuti secara efektif serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.

Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.



JULI 2026